



Balance Our Path for Sustainable Future

2020

Laporan Keberlanjutan

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)



Balance our path for sustainable future

Tema ini kami pilih karena pada tahun 2020 kami menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi. Dikarenakan pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pertumbuhan industri asuransi membuat kami melihat adanya peluang-peluang bisnis baru. Hal ini tercermin dari berbagai upaya untuk mengelola dampak usaha kami terhadap lingkungan dan pemangku kepentingan. Kami optimis bahwa kami mampu dan solid untuk menghadapi berbagai perubahan yang ada, harus diiringi komitmen kuat agar dapat tercipta pencapaian yang berkesinambungan dan berkelanjutan

Sambutan Direksi

[GRI 102-14]



Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita panjatkan atas limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan, sehingga PT Reasuransi Utama Indonesia (Persero) dapat melalui tahun 2020 dengan kinerja yang baik.

Tahun 2020 ditandai oleh pandemi COVID-19 yang menekan perekonomian global hingga mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia. COVID-19 memaksa aktivitas bisnis maupun kehidupan lainnya mengarah pada kebiasaan baru atau “new normal”, antara lain membatasi aktivitas sosial.

Sementara inflasi berada di titik yang sangat rendah, yaitu 1,68%. Indikator

tersebut mengisyaratkan adanya penurunan daya beli masyarakat, sehingga menurunkan tingkat permintaan. Hal itu tercermin dari data pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 sebesar minus 2,63%.

Tahun 2020 ini merupakan tahun yang penuh tantangan bagi kami. Kami mengalami penurunan gross premium dan sebaliknya, meningkatkan incurred claim. Tekanan tersebut juga kian terasa karena adanya penurunan nilai aset investasi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang memberikan dampak serius terhadap laba. Kendati demikian, dengan komposisi portofolio class of bussiness yang seimbang dan nilai cadangan premi yang cukup memberikan kemampuan bagi kami untuk bertahan, walaupun jika kondisi krisis seperti tahun 2020 terjadi selama 3-5 tahun.

Tinjauan Industri

Dampak COVID-19 secara langsung mempengaruhi industri asuransi karena industri tersebut berhubungan langsung dengan nasabah/masyarakat dan entitas yang membutuhkan proteksi asuransi. Dengan demikian, tekanan penurunan premi dan peningkatan klaim pada industri asuransi berdampak juga pada kinerja Indonesia Re. Kondisi industri asuransi yang sedang mengalami tekanan tentu tidak serta merta membuat Indonesia Re meninggalkan para nasabah, akan tetapi justru hadir memberi solusi reasuransi yang lebih baik dari sisi produk, pricing dan layanan claim recovery.

Dari sisi kinerja, meskipun sempat melemah di awal tahun, industri asuransi tahun 2020 mengalami kenaikan, melanjutkan pertumbuhan tahun 2019. Hal itu ditandai oleh pertumbuhan premi, aset dan investasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan Statistik Asuransi Indonesia.

Di tengah kondisi perekonomian yang berat akibat pandemi COVID-19, premi industri asuransi nasional tahun 2020 naik sebesar 4,28% dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp478,7 triliun pada 2019 menjadi Rp499,2 triliun. Sedangkan premi bruto industri reasuransi tahun 2020 tercatat sebesar Rp27,1 triliun, naik 23,18% dari capaian tahun 2019 yang sebesar Rp22,0 triliun.

Premi Industri Reasuransi Nasional



Premi Bruto Industri Reasuransi



Tantangan yang Dihadapi

Pada tahun 2020, kami menghadapi kendala menurunnya pertumbuhan industri asuransi akibat penurunan ekonomi nasional yang merupakan imbas dari COVID-19 sehingga sumber bisnis baru menjadi terbatas. Kondisi tersebut tentunya memberikan dampak terhadap pencapaian target yang telah kami

tetapkan, yakni dengan menekan hasil usaha Perusahaan, terutama disebabkan penurunan premi dan peningkatan kewajiban klaim. Selain itu, beban kupon Obligasi Wajib Konversi (OWK) juga cukup menekan laba Indonesia Re.

Kendala lain yang dihadapi ialah peristiwa banjir yang melanda Jabodetabek di awal tahun 2020 serta klaim atas gagalnya peluncuran satelit pada bulan April 2020 untuk bisnis reasuransi pesawat udara. Kondisi ini telah mendorong kenaikan beban klaim terjadi.

Kami juga masih melihat adanya kecenderungan peningkatan loss ratio dari beberapa class of business, seperti asuransi kredit, asuransi kesehatan, dan asuransi motor yang perlu menjadi perhatian dalam menentukan kebijakan underwriting. Tidak hanya itu, kami juga mengalami tantangan pada asuransi rangka kapal di mana pendapatan premi terus menurun sementara beban klaim terus meningkat.

Strategi dan Kebijakan Strategis

Kami melakukan berbagai inisiatif sebagai strategi dan kebijakan strategis yaitu, kami akan mengurangi portofolio bisnis dengan loss ratio tinggi, yaitu asuransi jiwa kredit dan asuransi kesehatan serta single premium business. Selain itu, kami berupaya untuk membuat pasar asuransi rangka kapal (marine hull) menjadi lebih

profitable dengan menerapkan rate yang cukup dan T&C yang lebih baik. Kami juga akan mengimplementasikan Enterprise Risk Management yang diharapkan mampu memajemen risiko yang efektif dan efisien.

Inisiatif yang kami lakukan untuk meningkatkan pendapatan yaitu dengan fokus untuk mengoptimalkan kapasitas pada bisnis fakultatif guna mengimbangi bisnis treaty, terutama pada class of business harta benda (fire) dan rekayasa (engineering). Pada bisnis treaty, kami mengurangi sumber-sumber bisnis dengan loss ratio tinggi, seperti asuransi jiwa kredit dan asuransi kesehatan.

Kami juga berusaha mencapai Estimated Premium Income (EPI), mendorong pencapaian Adjustment Premium Treaty Non Proportional dan optimalisasi sesi treaty, mengejar global accounts. Selain itu, kami mempertahankan share reasuransi jiwa untuk ceding prioritas terkait POJK No. 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri.

Komitmen Penerapan GCG

Indonesia Re terus berusaha melakukan perbaikan pada semua unit kerja, peningkatan kinerja perusahaan serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen secara berkesinambungan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, penerapan prinsip tata kelola perusahaan

yang baik (GCG) sebagai nilai yang sangat penting bagi kami.

implementasi GCG tidak hanya sekadar upaya pemenuhan terhadap regulasi, akan tetapi merupakan kesadaran internal untuk membuat perusahaan hidup dalam kondisi bisnis yang sehat, bertanggung jawab dan berdaya tahan tinggi dalam menjawab tantangan bisnis. Implementasi GCG sudah menjadi sebagai well governed company. Penerapan praktik GCG telah ditetapkan sebagai salah satu indikator dalam Key

Performance Indicator (KPI) yang tercantum dalam Kontrak Manajemen Direksi.

Aset tumbuh sebesar 7,23%, ekuitas tumbuh sebesar 6,29%, Risk Based Capital 214,9%, Tingkat Kesehatan Perusahaan memperoleh skor 70,00 digolongkan dalam kondisi "SEHAT" kategori "A" serta hasil Assessment penerapan GCG tahun 2020 memperoleh skor 90,42% dengan klasifikasi "Sangat Baik".



Apresiasi dan Penutup

Indonesia Re berupaya menjaga pencapaian yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris atas dukungan, masukan dan kerja sama yang terjalin dengan baik. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2020.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan lain, baik regulator, nasabah, maupun mitra kerja. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan semoga kerja sama yang baik dapat terus tercipta ke depannya.

Melalui capaian yang terjadi sepanjang 2020, Kami optimistis bahwa kami mampu dan solid dalam menghadapi

beragam tantangan yang akan menjadi modal untuk meningkatkan daya saing sehingga mampu berkompetisi di pasar internasional serta mampu menciptakan peluang dan kesempatan baru untuk terus tumbuh dan berkelanjutan.



Direktur Utama

Benedictus (Benny) M. Waworuntu

Ikhtisar Keberlanjutan



Keuangan



Total Aset
Dalam Juta Rupiah

2020

10.491.571

2019

9.783.822



7,23%



Total Ekuitas
Dalam Juta Rupiah

2020

3.429.606

2019

3.226.629



6,29%



Laba (Rugi) tahun berjalan diatribusikan kepemilik entitas Induk
Dalam Juta Rupiah

2020

104.052

2019

219.900



52,68 %



Return on Assets
Dalam Persen

2020

0,94%

2019

4,58%



79,4%



Rasio Kecukupan Investasi
Dalam Persen

2020

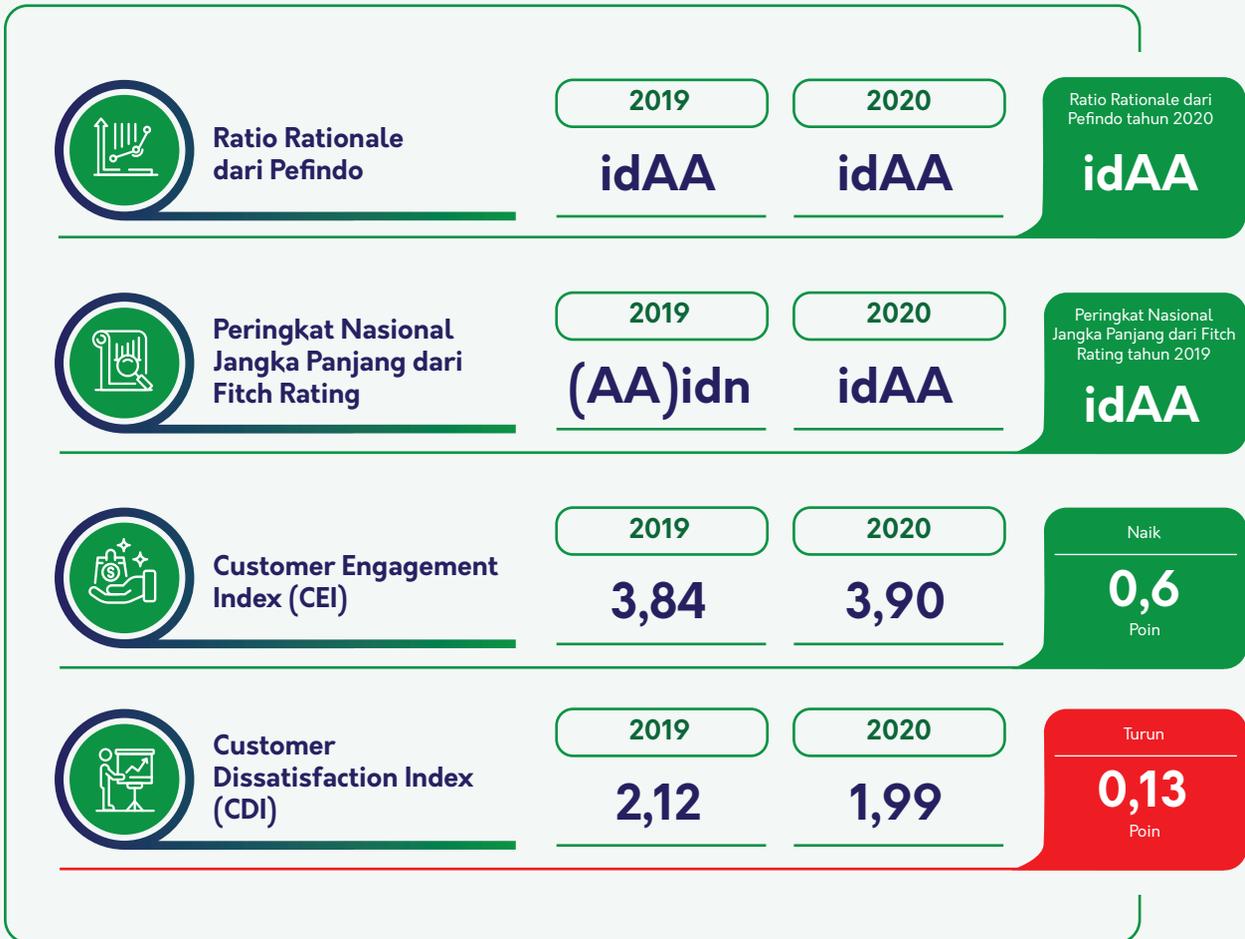
152,42%

2019

157,08%



3,00%



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan





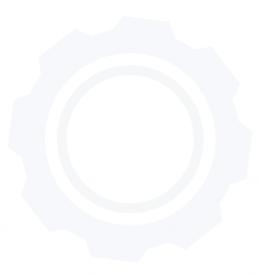
Program Ketenagakerjaan





01

**Daftar
Isi** _____





Daftar Isi

02**Tema**

03 Sambutan Direksi

08 Ikhtisar Keberlanjutan

11**Daftar Isi****14****Perjalanan 35 Tahun****16****Peristiwa Penting
Tahun 2020****18****Award****19****About Indonesia Re**

20 Legalitas Perusahaan

22 Bidang Usaha

22 Produk, Jasa dan Target Pasar

27 Visi dan Misi

28 Budaya Perusahaan

29 Budaya Perusahaan

34**Ekonomi yang
Berkelanjutan**

42 Kinerja Keuangan

45**Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan**

48 Visi dan Misi CSR

56 Program Bina Lingkungan

61

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

72 Fungsi Kepatuhan

77 Pelaporan Pelanggaran

82 Kode Etik

87 Kebijakan Gratifikasi

93 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

96

Pemangku Kepentingan

102

Menuju Lingkungan yang Lestari

108

Menciptakan Iklim Kerja yang Kondusif

125

Pengembangan Kompetensi Karyawan

128

Tentang Laporan

153

Lembar Umpan Balik

Perjalanan 35 Tahun



Pendirian PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1983. Perseroan bergerak di bidang asuransi, untuk mendukung pengembangan ekspor nonmigas. (30 November 1985).

1985

Perubahan orientasi bisnis menjadi Perusahaan komersial dengan melebarkan sayap untuk melayani Perusahaan lain.

2002

2013

Seiring dengan perkembangan dan dinamika bisnis, PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), membangun identitas korporasi baru dengan perubahan logo Perusahaan dan pembangunan kultur Perusahaan yang siap menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat.

Perubahan nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) menjadi PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero), disingkat Asei Re. Seiring dengan perubahan nama perusahaan tersebut juga perubahan logo baru Asei Re.

PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) mendirikan anak perusahaan PT Asuransi Asei Indonesia untuk melaksanakan bisnis asuransi dan Penjaminan yang selama ini dijalankan PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) pada 9 Oktober 2014 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 08 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Marthin Aliunir, SH.

2014

Dengan dialihkannya bisnis PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Asei Indonesia maka beralih pula seluruh kewajiban (liability) yang dimiliki. PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) menjadi perusahaan yang tidak beroperasi (non-operating company).

OJK memberikan ijin pengalihan portofolio Bisnis Direct dan Reasuransi PT Asei Re kepada PT Asuransi Asei Indonesia, dan pada 17 Desember 2014 spin off

PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) berubah nama menjadi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau disingkat Indonesia Re.

2015

PT Reasuransi Indonesia Utama (persero) Melakukan merger dengan PT Reasuransi Umum Indonesia Utama (Persero). Dengan demikian PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) Bubar dengan sendirinya secara hukum tanpa likuidasi.

Dengan bergabungnya PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) ke dalam PT Reasuransi Indonesia (Persero), maka anak usaha PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) yaitu PT Reasuransi Internasional Indonesia secara otomatis menjadi anak usaha PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

PT Reasuransi Internasional Indonesia yang merupakan anak usaha dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) melakukan spin off divisi reasuransi syariah menjadi sebuah perusahaan Reasuransi syariah dengan nama PT Reasuransi Syariah Indonesia (RSI) dengan nama usaha ReINDO Syariah .

PT Reasuransi Internasional Indonesia melakukan merger vertikal dengan induk usaha PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) pada 30 Juni 2016.

2016



Peristiwa Penting Tahun 2020



03 Februari

Penandatanganan MoU Kerjasama Bisnis Cluster BUMN Asuransi II Indonesia Re melakukan penandatanganan MoU kerjasama Bisnis Cluster BUMN Asuransi II bersama PT Jasa Raharja (Persero), PT Askrindo (Persero), PT Jasindo (Persero), Perum Jamkrindo, PT KBI (Persero) dan PT Jiwasraya (Persero) yang bertempat di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2020.



13 Maret

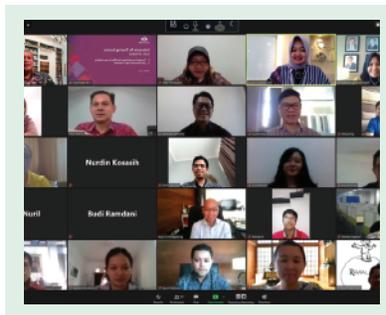
Indonesia Re Go Green Direksi, Kepala Divisi dan Milenials Indonesia Re melakukan kegiatan penanaman pohon dalam rangka program penghijauan (Go Green) di lingkungan gedung Indonesia Re pada tanggal 13 Maret 2020



16 - 25 April

Bantuan sosial untuk Tenaga Medis Indonesia Re ikut membantu tenaga medis menghadapi COVID-19 dengan menyalurkan 4 buah chamber disinfeksi dan 500 buah APD (Alat Pelindung Diri) untuk RS Fatmawati, RSI Pondok KOpi, RS Paru GP, Bogor, RS Awal Bros, RS Rawa Lumbu dan RS Tebet. Bantuan diserahkan secara bertahap dari tanggal 16 - 25 April 2020 oleh Department Head PKBL & CSR Indonesia Re Fredi Aries Setiawan.





19 - 20 Mei

Life Reinsurance Webinar (Indonesia Re Sharing Session: COVID-19 Pandemic). Webinar dibuka oleh Direktur Utama Indonesia Re Kocu A Hutagalung dengan diikuti oleh 30 orang peserta baik underwriters maupun aktuaris dari beberapa perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2020. Topik webinar ini antara lain membahas mengenai Corona-Virus and *How is The Effect to Our Industry*, *Loan Restructuring in Indonesia*, *Impact to Medical Requirement* dan *Force Majeure Clause Application*.



20 Juni

Bantuan Sosial untuk Masyarakat Terdampak COVID-19 Indonesia Re melalui Corporate Secretary Mardian Adhitya menyerahkan bantuan 500 paket sembako kepada Kepala Desa Leuwimalang Yayan Nuryana untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang berada di sekitar Balai Peristirahatan Arga Sonya (BPAS) milik perusahaan pada tanggal 20 Juni 2020 di Cisarua, Bogor.



28 Agustus

Indonesia Re mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menerima Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 yang diserahkan oleh Direktur Asricert Hasnop Putra kepada Direktur Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Indonesia Re Putri Eka Sukmawati di gedung Indonesia Re pada tanggal 28 Agustus 2020.

Award



01

The Most Innovative
Reinsurance
Companies
in Indonesia

From

**The
Iconomics**

02

Gold Winner
Market
Domination,
Brand
Strength

From

**The
Iconomics**

03

The Most Resilient
BUMN 2020
Category Non
Public
Company
Financial
Sector with
Asset Up To
Rp 15 Trillion

From

**Bisnis
Indonesia**





02

About Indonesia Re



Sekilas Tentang Indonesia Re

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau disebut Indonesia Re didirikan dengan nama PT Asuransi Ekspor Indonesia, berdasarkan Akta No. 173 tanggal 30 November 1985 yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H. Notaris pengganti dari Imas Fatimah, S.H. Notaris di Jakarta.

[GRI 102-1]

PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) ditunjuk untuk menjadi cangkang perusahaan reasuransi nasional dengan core business yang sebelumnya asuransi menjadi bisnis reasuransi. Hal ini sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri dengan membentuk Perusahaan Reasuransi Nasional (PRN) melalui penggabungan Perusahaan Reasuransi di Indonesia.

Setelah perubahan core business perusahaan tersebut, maka PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) bertransformasi atau berubah nama menjadi PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) atau disebut "Asei Re".

Pada tanggal 22 Desember 2014, Asei Re kemudian berubah nama menjadi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re. Perubahan tersebut dilakukan oleh Kementerian BUMN Sebagai tindak lanjut dari pembentukan PRN dan perubahan nama tersebut tertuang dalam Akta Nomor 36 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dihadapan

dihadapan Notaris Sastryany Josoprawiro, SH., dan telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-13377.40.20.2014 tanggal 23 Desember 2014.

Setelah melakukan perubahan nama, pada tanggal 18 Desember 2015 Indonesia Re menerima penggabungan dari PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) (RUI) berdasarkan Akta Nomor 19 Tahun 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Sugina Mulyani, SH di Jakarta.

Penggabungan RUI ke dalam Indonesia Re merupakan cikal bakal penting dalam beroperasinya PRN. RUI merupakan Induk dari PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReINDO), yaitu anak perusahaan BUMN yang menjalankan bisnis reasuransi dan menjadi engine/motor penggerak PRN yang dilakukan oleh Indonesia Re.

Legalitas Perusahaan:

Sejak tahun 1985, PT Reasuransi Indonesia Utama (RIU) lahir dan berkembang di Indonesia dengan komitmen untuk terus dapat berkembang dan meningkatkan pertumbuhan Reasuransi di Indonesia.

**Nama Perusahaan**

[GRI 102-1]

PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

**Lokasi Kantor Pusat**

[GRI 102-3]

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)Jl. Salemba Raya No.30
Jakarta Pusat 10430,
Indonesia**Telepon**

62-21 3920101

**Faksimili**

62-21 3143828

**E-mail**

cosecretary@indonesiare.co.id

**Bentuk Badan Hukum**

[GRI 102-5]

Perseroan Terbatas

**Struktur Pemegang Saham**

[GRI 102-5]

**Bidang Usaha**

[GRI 102-2]

Reasuransi Jiwa dan Reasuransi Umum

Bidang Usaha [GRI 102-2]

Aktivitas RUI terdiri dari :

01

Menyelenggarakan usaha pertanggung ulang untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

02

Menyelenggarakan sebagian dari usaha pertanggung ulang berdasarkan prinsip syariah, untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah.

03

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan reasuransi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk, Jasa, dan Target Pasar [GRI 102-2]

Jenis Pertanggung

Kami tidak memiliki kantor cabang maupun kantor Representatif , dan jenis produk yang kami sediakan adalah jasa pertanggung ulang atau reasuransi yang meliputi bisnis Reasuransi Umum

dan Reasuransi Jiwa, dan hanya melayani pasar di dalam Indonesia saja Berikut adalah produk-produk asuransi yang dapat ditanggung ulang oleh kami, yaitu: [GRI 102-4][GRI 102-6]

Reasuransi Umum

Menyediakan jasa pertanggungan ulang atau reasuransi untuk seluruh jenis produk Asuransi Umum yang meliputi:

Asuransi Harta Benda

Memberikan jaminan reasuransi atas kerugian dan atau kerusakan pada harta benda.

Asuransi Rekayasa

Memberikan jaminan reasuransi atas kerugian atau kerusakan yang dialami pada saat pekerjaan konstruksi atau pemasangan mesin, serta perlindungan terhadap mesin dan hasil konstruksi setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

Asuransi Pengangkutan

Menyediakan penjaminan ulang (reasuransi) terhadap barang melalui suatu sarana alat angkut baik darat, laut, maupun udara sesuai dengan luas jaminan polis.

Asuransi Rangka Kapal

Memberikan proteksi reasuransi terhadap kerusakan atau kehilangan atas rangka kapal berikut mesin-mesin penggeraknya akibat dari hal – hal yang dijamin dalam polis.

Asuransi Pesawat Udara

Menyediakan proteksi reasuransi pada pesawat terbang, mesin dan atau berbagai peralatan lainnya dan juga berupa jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Asuransi Motor

Memberikan jaminan reasuransi untuk kendaraan bermotor dari kerugian atau kerusakan akibat tabrakan, kecelakaan satu pihak, kebakaran dan pencurian. Jaminan ini dapat diperluas termasuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, kecelakaan diri, kerusuhan, terorisme dan sabotase, banjir serta gempa bumi.

Asuransi Aneka

Jaminan reasuransi untuk Asuransi Aneka ini meliputi:

- Asuransi Kecelakaan Diri
- Memberikan santunan kematian, cacat tetap (baik sebagian atau seluruhnya) cacat sementara (baik sebagian atau seluruhnya) serta santunan biaya pengobatan akibat kecelakaan diri, contohnya *Personal Accident, Travel Insurance*.

- Asuransi Kebongkaran (*Burglary*)
- Menjamin kerugian tertanggung atas barang-barang yang disimpan di suatu bangunan yang diasuransikan, yang diakibatkan oleh pencurian dan pembongkaran yang disertai dengan tindak pemaksaan dan perusakan.

Asuransi Tanggung Gugat Memberikan jaminan perlindungan kepada Tertanggung, terhadap risiko yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain (Pihak Ketiga) sehubungan dengan aktivitas personal/perusahaan milik Tertanggung.

Asuransi Papan Reklame (*Billboard*) Menyediakan jaminan atas kerusakan dari *Billboard (material damage)* dan tanggung jawab hukum pihak ketiga (TPL) atas obyek yang dipertanggungkan.

Asuransi *Hole In One* Memberikan perlindungan kepadapanitia/sponsor atas hadiah yang telah ditetapkan akibat terjadinya *Hole-in-One* pada lubang yang telah ditetapkan. Pada umumnya yang dijamin dalam asuransi adalah hole dengan PAR 3.

Financial Lines

Memberikan proteksi reasuransi untuk produk asuransi kredit, Kontra Bank Garansi dan Surety Bond.

Asuransi Kredit Merupakan proteksi yang diberikan pihak asuransi (selaku penanggung) kepada bank (selaku tertanggung) atas risiko kegagalan

debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (*cash loan/direct loan*)

Kontra Bank Garansi Bukti penjaminan dari *Surety* (perusahaan asuransi) atas bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan *Principal* sebagaimana dipersyaratkan oleh *Obligee*. Dalam hal ini *Surety* telah terikat membayar ganti rugi kepada bank atas klaim bank garansi yang diajukan oleh *Obligee*.

Surety Bond Perjanjian 3 pihak antara *Surety* (Asuransi) dan *Principal* (Kontraktor) untuk menjamin kepentingan *Obligee* (Pemilik proyek), dimana apabila *Principal* gagal melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dengan *Obligee*, maka *Surety* akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban *Principal*.

Reasuransi Jiwa

Menyediakan jasa pertanggung ulang atau reasuransi untuk seluruh jenis produk Asuransi Jiwa yang meliputi:

Life Insurance

Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan atau tanpa manfaat hidup berupa nilai tunai, dana investasi, atau manfaat tahapan. Untuk produk ini, risiko yang di-cover oleh perusahaan reasuransi adalah risiko meninggal dunianya saja, khususnya produk yang memiliki nilai tunai, unsur tabungan atau investasi.

Personal Accident

Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat apabila tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tertanggung meninggal dunia, dan atau menderita cacat tetap total atau sebagian dan atau tertanggung yang membutuhkan penggantian biaya pengobatan atau perawatan di rumah sakit.

Critical Illness

Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat apabila tertanggung didiagnosa menderita salah satu penyakit kritis yang dijamin selama masa pertanggung.

Hospital Cash Plan

Merupakan produk asuransi kesehatan yang memberikan jaminan berupa uang santunan harian dan atau biaya pembedahan apabila tertanggung menderita sakit yang dikarenakan oleh suatu penyakit atau kecelakaan sehingga tertanggung harus dirawat inap di rumah sakit atas anjuran dokter.

Hospitalization atau Asuransi Kesehatan

Merupakan produk asuransi yang menjamin biaya-biaya perawatan kesehatan di rumah sakit ataupun dokter untuk tertanggung yang menderita sakit, baik disebabkan oleh suatu penyakit ataupun kecelakaan, baik rawat inap, rawat jalan, maternity, kaca mata dan perawatan gigi.

Asuransi Jiwa Kredit

Merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat berupa pembayaran sisa pinjaman tertanggung apabila tertanggung / debitur meninggal dunia dan atau menderita cacat tetap total dalam masa asuransi, baik dengan ataupun tanpa bunga keterlambatan dan tunggakan.

Asuransi Jiwa Tabungan

Merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat sebesar sisa setoran bulanan hingga akhir masa asuransi atau sejumlah perkalian setoran bulanan, apabila tertanggung meninggal dunia atau menderita cacat tetap total baik yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun disebabkan kecelakaan.

Total Permanent Disability

Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat apabila tertanggung menderita cacat tetap total, baik yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun disebabkan kecelakaan.

Waiver of Premium

Merupakan produk asuransi yang menjamin tertanggung dibebaskan dari pembayaran premi yang harus dibayar apabila pemegang polis meninggal dunia dan atau menderita cacat tetap total dan atau menderita penyakit kritis di dalam masa pembayaran premi asuransi.

Dalam periode laporan, terjadi pergantian dalam jajaran Direksi dan Komisaris namun tidak terdapat perubahan struktur organisasi baru, tidak ada perubahan signifikan dalam perubahan lokasi, serta tidak ada pembukaan dan penutupan fasilitas.

[GRI 102-10]



Visi dan Misi [GRI 102-16]

Visi

Menjadi partner yang kredibel dalam penyediaan solusi reasuransi dengan kapabilitas inovasi tingkat dunia

Misi

Meningkatkan pengetahuan, kapabilitas dan penerapan inovasi dalam asuransi/reasuransi.

Memberikan solusi reasuransi berstandar internasional kepada nasabah.

Meningkatkan pasokan dan retensi reasuransi Indonesia



Budaya Perusahaan



Innovative

Melakukan pembaruan terus menerus



Educative

Bersifat mendidik



Notable

Terkemuka



Secure

Memberikan rasa aman



Discipline

Patuh pada peraturan / Ketentuan yang berlaku



Integrity

Karakter yang kokoh dalam menjaga kepercayaan dan kejujuran



Objective

Bertindak tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau kepentingan pribadi



Agility

Gesit dalam menjalankan tugas



Nationalism

Mencintai bangsa dan negara sendiri



Reliable

Dapat diandalkan



Excellence

Memiliki keunggulan

Budaya Kerja Karyawan

[GRI 102-16]



01

Antisipatif

02

Menepati Janji

03

Terus Belajar

04

Bekerja efektif dan Tuntas

05

Suka Bekerja sama dan bersinergi

06

Berorientasi Target dan menjadi pemenang

07

Berpenampilan representatif, tersenyum dan komunikatif

Kami memiliki tujuh perilaku yang menjadi nilai dasar yang menjadi aspek penting dalam setiap aktivitas karyawan, yaitu:



Prinsip Kehati-hatian [GRI 102-11]

Kami juga menerapkan prinsip pencegahan dalam perencanaan operasional dan dalam pengembangan produk-produk yang baru. Hal ini kami lakukan untuk memastikan bahwa dampak

negatif pada lingkungan dapat dihindari atau diminimalisasi dengan berbagai kebijakan dan strategi antara lain, ISO 37001 dan ISO 9001.

Prakarsa Eksternal [GRI 102-12]

Kami berkomitmen dapat bersaing di Industri Reasuransi dengan terus melakukan inovasi setiap tahunnya. Pada tahun pelaporan kami melakukan perbaikan, perkembangan serta inovasi agar memastikan sistem yang berlaku di

Perusahaan sesuai dengan standar mutu dan praktik-praktik terbaik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Kami melakukan standar mutu yang terintegrasi dengan kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

No.	Jenis Prakarsa Eksternal	Badan Sertifikasi	Masa Berlaku
01.	Risk Maturity Index	SPRINT	2020 s.d 2022
02.	ISO 27001:2013	TUV Nord Indonesia	2020 s.d 2024
03.	ISO 27000-1:2018	TuV Nord Indonesia	2021 s.d 2024
04.	IT Maturity Level	TRANSFORMA	2021 s.d 2022
05.	ISO 37001	ASRICERT	2020 s.d 2023
05.	ISO 9001	SUCOFINDO	2020 s.d 2023

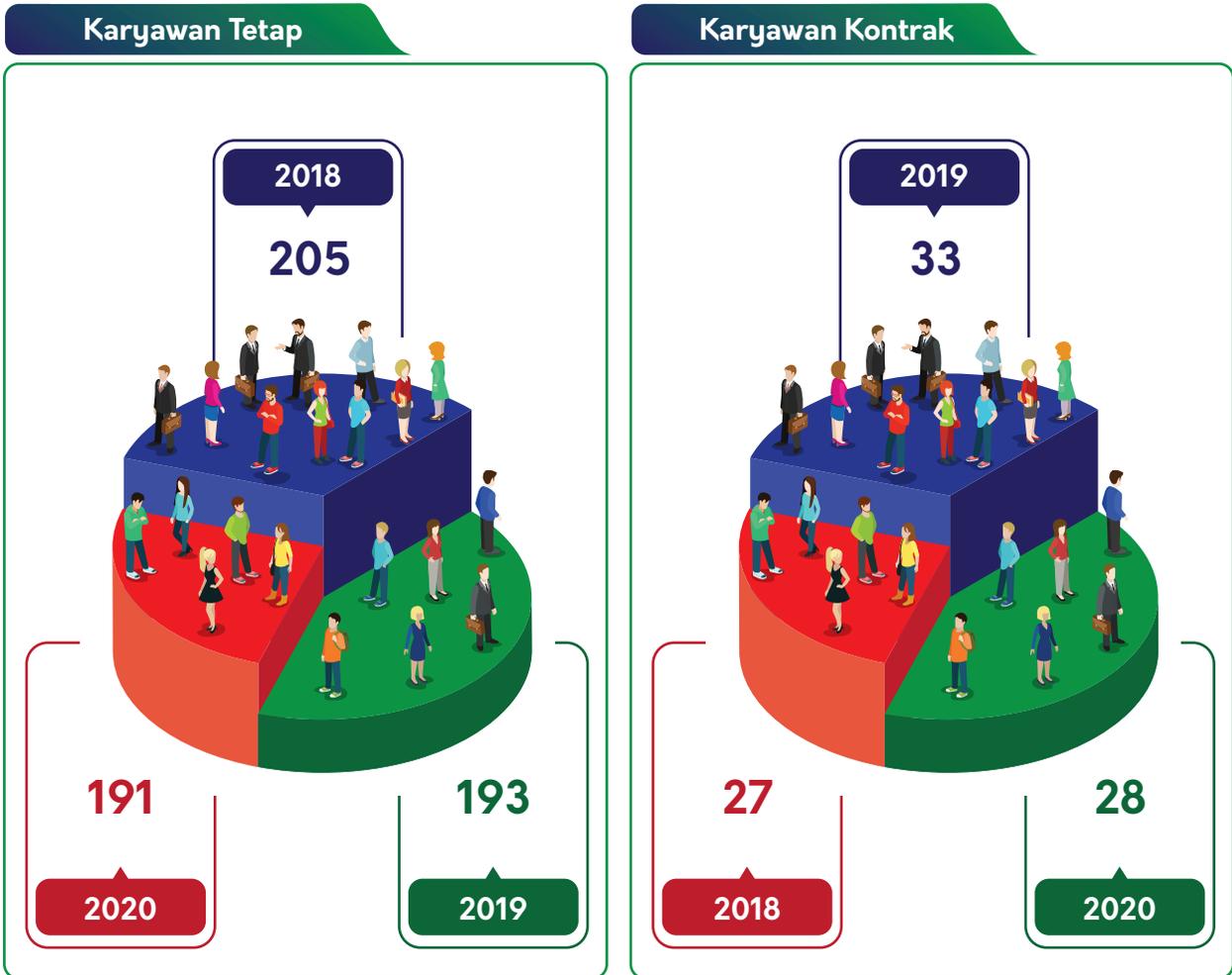
Skala Perusahaan [GRI 102-7]

	2020	2019	2018
 Jumlah Karyawan Satuan: Orang	219	226	233
 Jumlah Pendapatan Jutaan Rupiah	4.365.554	4.385.732	4.136.520
 Jumlah Liabilitas Jutaan Rupiah	7.061.947	6.557.176	5.786.781
 Jumlah Ekuitas Jutaan Rupiah	3.429.606	3.226.629	2.904.915
 Jumlah Aset Jutaan Rupiah	10.491.571	9.783.822	8.691.696
 Laba Usaha Jutaan Rupiah	185.498	256.134	227.685
 Laba Tahun Berjalan Jutaan Rupiah	104.052	219.840	203.386



Operasional kami selama tahun 2020 didukung penuh oleh karyawan tetap yang berjumlah 191 orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh kami.

Jumlah Karyawan [GRI 102-8]



	2020	2019	2018
 Total	219	226	232

Keanggotaan pada asosiasi [GRI 102-2]



AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia)
Jabatan: Member



AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia)
Jabatan: Member

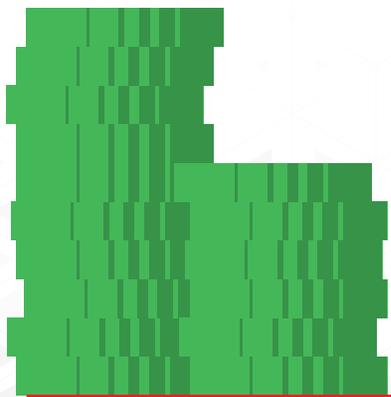


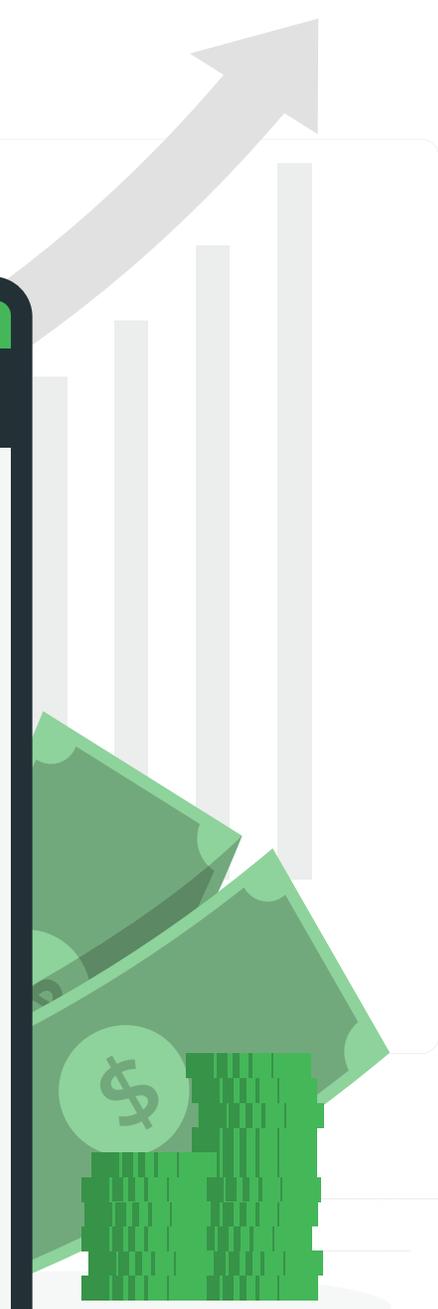
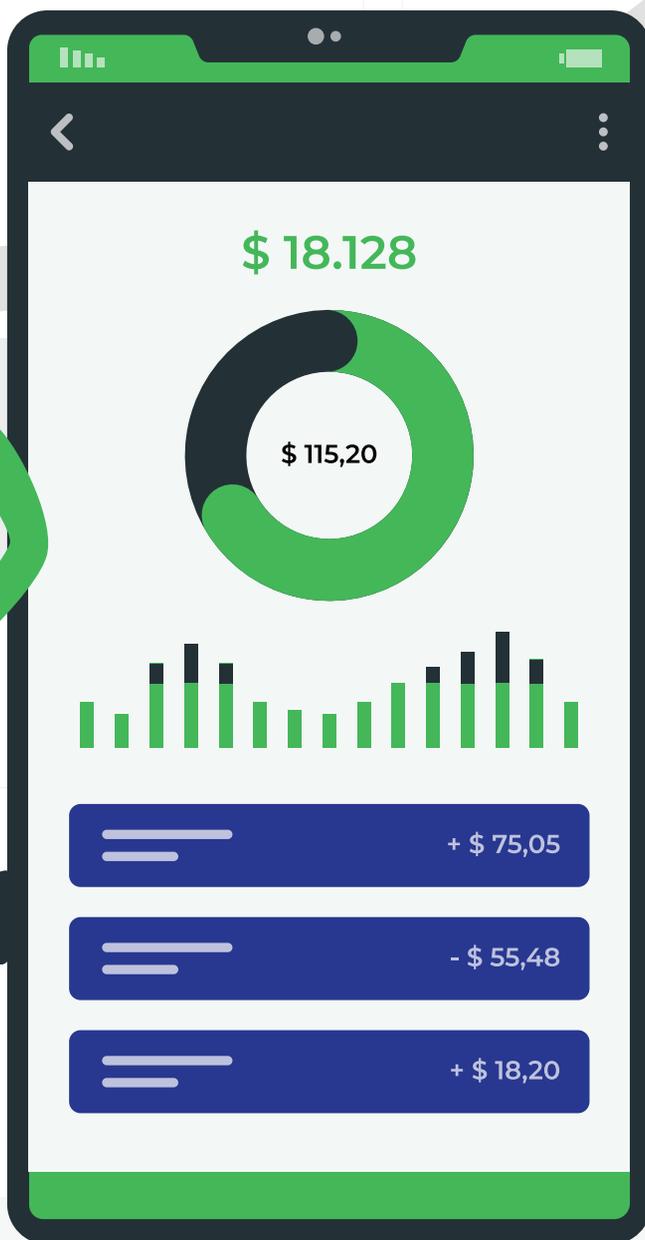
BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia)
Jabatan: Member





Ekonomi Yang Berkelanjutan





Nilai Ekonomi langsung yang dihasilkan



Tahun 2020 diisi oleh tantangan berupa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia yang mengakibatkan semua aspek kehidupan mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap kebiasaan baru yang cukup signifikan. Hal

tersebut juga sedikit banyak akan mempengaruhi pencapaian perusahaan, namun kita tetap berharap agar kondisi semakin membaik begitu juga dengan industri asuransi dan reasuransi nasional.

[GRI 201-1]

Tinjauan Ekonomi Indonesia

Pandemi COVID-19 telah memperlambat pergerakan roda ekonomi karena ada keharusan untuk membatasi aktivitas masyarakat. Indonesia, bersama dengan negara tetangga di ASEAN, harus berperan aktif dalam memantau dan membuat kebijakan agar roda perekonomian dapat terus berjalan.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa kebijakan fiskal dalam merespons dampak pandemi COVID-19.

Per 1 Juli 2020, berdasarkan data dari IMF, tidak kurang dari Rp 677 triliun Pemerintah berinisiasi untuk menjalankan program pemulihan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah bantuan pada sektor kesehatan terutama dalam melakukan tes kesehatan terkait COVID-19, penyediaan bantuan tunai kepada masyarakat berpendapatan rendah yang terkena dampak atas pandemi, dana subsidi, hingga relaksasi pajak.

Tinjauan Industri Asuransi dan Reasuransi

Tahun 2020 menjadi tahun yang memaksa semua lini kehidupan mengarah pada kebiasaan baru atau “new normal”, antara lain membatasi aktivitas sosial akibat adanya pandemi COVID-19. Kondisi tersebut mendorong dunia usaha harus berinovasi untuk tetap menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Sebagai organisasi yang mampu melakukan adaptasi dan penuh dengan inovasi, Indonesia Re terus berupaya untuk menyesuaikan kebiasaan baru tersebut melalui penetapan arah untuk pertumbuhan baru. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penyusunan sejumlah target yang disesuaikan dengan kondisi “new normal”.

Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Pemegang Saham untuk tahun mendatang yakni akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Selain itu, dalam rangka transformasi ekonomi menuju negara maju melalui transformasi model bisnis BUMN dan konsolidasi serta restrukturisasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial.

Beragam rencana strategis yang telah ditetapkan itu dilakukan dengan tetap menjaga prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang terkendali, menjaga kesinambungan posisi keuangan BUMN, serta mengelola dan menciptakan sumber daya manusia unggul. Dengan begitu, Perusahaan dapat tetap tumbuh menjadi yang terbaik melalui berbagai transformasi dan inovasi sebagai upaya mencapai pertumbuhan yang baru.



Meskipun sempat melemah di awal tahun, industri asuransi tahun 2020 mengalami kenaikan, melanjutkan pertumbuhan tahun 2019 yang ditandai oleh pertumbuhan premi, aset dan investasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan Statistik Asuransi Indonesia. Di tengah kondisi perekonomian yang berat akibat pandemi COVID-19, premi industri asuransi nasional tahun 2020 naik sebesar 4,28% dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp478,7 triliun pada 2019 menjadi Rp499,2 triliun.

Sejalan dengan kenaikan pertumbuhan premi, total aset dan total investasi pada 2020 juga meningkat. Total aset industri asuransi nasional pada 2020 naik 6,34% menjadi Rp1.409,8 triliun dari capaian tahun lalu yang sebesar Rp1.325,7 triliun. Adapun total investasi industri asuransi nasional pada 2020 yakni Rp1.205,7 triliun, naik 5,60% dari posisi tahun sebelumnya Rp1.141,84 triliun.

	2020	2019	2018
 Premi	499,2	478,7	433,3
 Aset	1.409,8	1.325,7	1.209,6
 Investasi	1.205,7	1.141,8	1.036,6

Sebagai bentuk komitmen kami, pada tahun pelaporan kami melahirkan inovasi dalam rangka meningkatkan layanan kami kepada para ceding company dan memenuhi permintaan pasar. Kami mempunyai sistem yaitu Sistem Auto Pricing, yaitu sistem yang dapat menentukan harga premi secara otomatis untuk asuransi berjangka kumpulan atau Group Term Life (GTL).

Indonesia Re membagi kinerja segmen operasinya menjadi dua segmen, yaitu Reasuransi Jiwa dan Reasuransi Umum. Keduanya memiliki beragam produk dan layanan yang sesuai dengan target pasar masing-masing segmen tersebut.

Inisiatif Strategis Reasuransi Jiwa 2020

Pada tahun 2020, tantangan dan kendala bisnis Reasuransi Jiwa hampir sama dengan tantangan dan kendala pada tahun 2019 yaitu bisnis Asuransi Jiwa Kredit (AJK). Bisnis AJK yang memiliki karakteristik long term masih memberikan dampak yang signifikan berupa klaim yang besar untuk beberapa tahun ke depan atas bisnis existing. Kondisi ini diperparah dengan adanya perang tarif premi yang diberikan pada produk AJK sehingga menekan hasil underwriting bersih (HUB) Reasuransi Jiwa secara umum.

Selain itu, adanya permintaan kelonggaran term & condition (T&C) akibat COVID-19 seperti penghapusan waiting period khusus COVID-19 atau bahkan relaksasi efek restrukturisasi kredit juga

menjadi tantangan lainnya. Tidak hanya itu, permintaan tambahan benefit dengan utilisasi mendekati 100% seperti cover vaksin, isolasi mandiri, dan pengobatan COVID-19, membuat beban klaim menjadi naik.

Selain itu, sebagai upaya menghindari persaingan bisnis yang semakin tidak sehat, Indonesia Re mempresentasikan experience study kepada ceding-ceding company terkait kondisi bisnis AJK. Experience study yang dilakukan oleh Indonesia Re berdasarkan data-data bisnis AJK selama beberapa tahun. Hasil experience study ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan meningkatkan awareness market dan bisa lebih baik ke depannya.

Perusahaan juga melakukan sejumlah program yang menjadi fokus pada tahun 2020 yang mencakup:



Program perbaikan portofolio

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, fokus utama adalah perbaikan portofolio khususnya bisnis-bisnis AJK. Untuk bisnis AJK, Indonesia Re melakukan beberapa perbaikan antara lain perubahan T&C dan kenaikan rate.



Pengembangan produk baru

Indonesia Re akan mengembangkan bisnis baru untuk ceding. Pengembangan bisnis dilakukan oleh bagian Product Development Divisi Actuary.



Pricing Tools

Pengembangan pricing tools digunakan untuk supporting proses akseptasi. Dengan bantuan pricing tools, diharapkan proses akseptasi akan semakin cepat dan akurat.

Kinerja Reasuransi Jiwa 2020

Klaim incurred Reasuransi Jiwa pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup besar yakni sekitar 5 % dari posisi tahun 2019. Pertumbuhan tersebut didukung akibat dari performa beberapa produk yang kurang baik, mayoritas disumbang dari bisnis AJK. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan rasio klaim di industri reasuransi, yakni khususnya pada kelas kredit, yaitu sebesar 65 % pada tahun 2020 karena dampak dari pandemi.

Inisiatif Strategis Reasuransi Umum 2020

Pada tahun 2020, Perusahaan dihadapkan pada kendala menurunnya pertumbuhan industri asuransi akibat penurunan ekonomi nasional, sehingga sumber bisnis baru menjadi terbatas. Sebagai upaya mitigasi dari kendala tersebut, Perusahaan berusaha menghasilkan portofolio bisnis yang sehat dan berkelanjutan melalui beberapa kebijakan terkait dengan akseptasi bisnis.

Di antara inisiatif dimaksud adalah mengurangi portofolio bisnis dengan loss ratio tinggi, yaitu asuransi jiwa kredit dan asuransi kesehatan. Selain itu, Perusahaan berupaya untuk membuat pasar asuransi rangka kapal (marine hull) menjadi lebih profitable dengan menerapkan rate yang cukup dan term & condition yang lebih baik.

Dari sisi pendapatan premi, Indonesia Re mempunyai sumber bisnis yang berasal

dari dalam negeri. Selama tiga tahun terakhir, bisnis yang berasal dari luar negeri tumbuh pesat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 148%. Walaupun secara komposisi portofolio, bisnis yang berasal dari luar negeri ini masih sangat kecil, namun dapat menahan dampak dari turunnya bisnis yang berasal dari dalam negeri.

Terkait dengan hal-hal tersebut, kami telah membentuk cadangan premi yang cukup, sehingga di saat pendapatan premi berkurang, release dari cadangan premi ini dapat membantu Indonesia Re untuk tetap memberikan hasil underwriting yang baik.



Kinerja Reasuransi Umum 2020

Pada tahun 2020, premi reasuransi umum tercatat sebesar Rp 3,8 triliun, melambat 6,69 % dari realisasi tahun 2019 Rp 4,0 triliun. Penurunan kinerja pada tahun 2020 ini disebabkan oleh pengurangan bisnis dengan loss ratio yang tinggi, sehingga pendapatan premi lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan pendapatan premi pada bisnis treaty juga menekan kinerja reasuransi umum pada tahun 2020. Meskipun demikian, bisnis fakultatif pada tahun buku memberikan kinerja yang sangat baik. Optimalisasi kapasitas pada bisnis fakultatif menghasilkan pendapatan premi

di bisnis ini pada tahun 2020 di atas tahun lalu.

Pada bisnis treaty, walaupun kinerjanya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun ke depan diharapkan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Adapun secara proporsi, kontribusi terbesar berasal dari produk Harta Benda, dengan porsi sebesar 57,56 % dari total premi.

Dari sisi klaim incurred, reasuransi umum membukukan sebesar Rp 1,9 triliun pada tahun 2020, mengalami kenaikan 7,56 % dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,7 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan beban klaim pada bisnis treaty, beban klaim meningkat dari tahun lalu akibat adanya beberapa klaim besar, termasuk klaim catastrophe.



Kinerja Keuangan



Perusahaan mencatatkan saldo laba 2020 sebesar Rp 1,7 triliun, meningkat 13,33 % dari posisi 2019 yang sebesar Rp 1,5 triliun. Kenaikan tersebut didorong oleh laba Perusahaan dan kenaikan penghasilan komprehensif lainnya.

Sepanjang tahun 2020, total aset yang dibukukan oleh Indonesia Re mencapai Rp 10,5 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp 9,8 triliun, telah terjadi peningkatan 7,23 %. Hal itu, antara lain disebabkan oleh meningkatnya nilai penempatan investasi serta meningkatnya aset retrosesi. [GRI 201-1]

Tabel Distribusi Nilai Ekonomi [GRI 201-1]

Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan			
	2020	2019	2018
 Pendapatan Premi Neto	6.537.554	6.574.498	6.213.057
Nilai Ekonomi Langsung Yang Didistribusikan			
	2020	2019	2018
 Gaji dan Tunjangan Karyawan	160.869	214.950	211.483

	2020	2019	2018
 Biaya Operasional	128.336	102.564	109.582
 Imbalan Kerja	15.505	16.288	16.441
 Program Kemitraan & Bina Lingkungan	8.085	15.367	19.000
 Dividen	0	0	10.169
Total Nilai Ekonomi yang Disimpan	104.052	219.840	203.386

Kontribusi kepada Pemerintah

Indonesia Re senantiasa mematuhi seluruh aturan yang terkait dengan operasional Perusahaan, termasuk peraturan perpajakan. Sepanjang tahun pelaporan, kami tidak menerima bantuan finansial baik secara langsung dan tidak langsung dari Pemerintah. kami juga tidak

memberikan sumbangan dalam bentuk dan cara apa pun. Berikut adalah pembayaran pajak yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2020 sebagai wujud dari ketaatan sebagai wajib pajak.

[GRI 201-4]

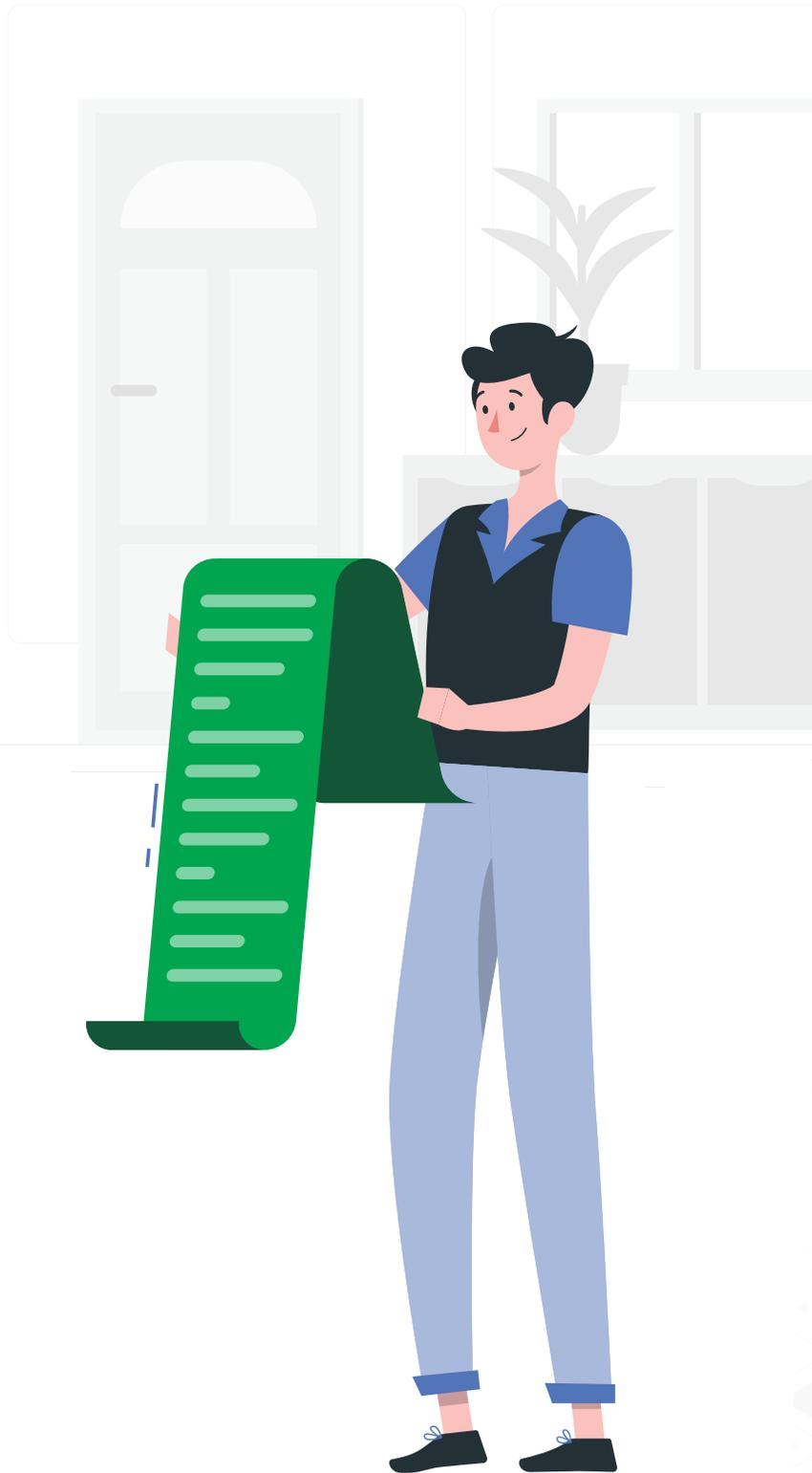
	2020	2019	2018
 Pajak Penghasilan Badan	93.239.248	3.680.274.343	(37.141.820.013)

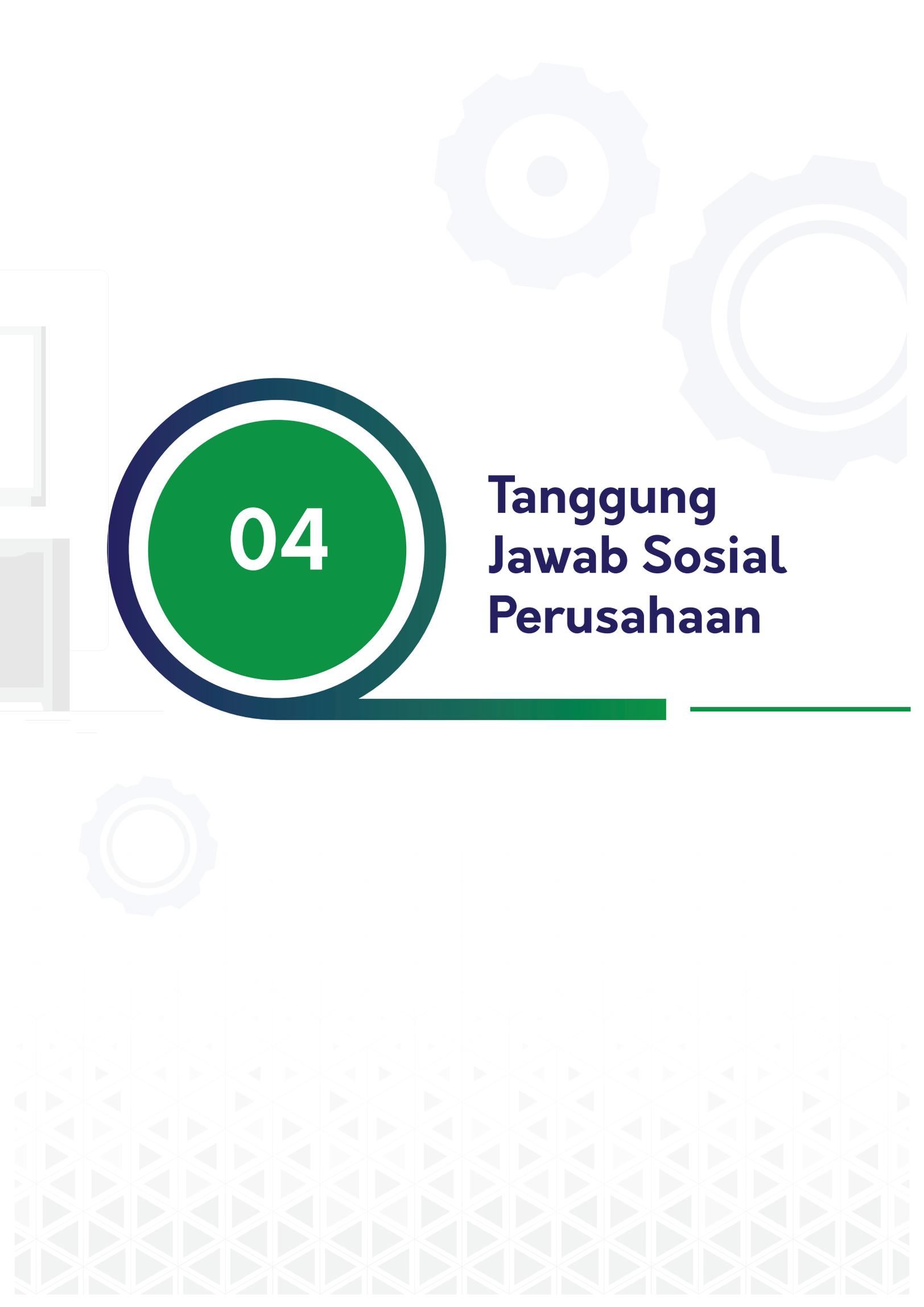
Praktik Pengadaan

Kami berkomitmen agar sebisa mungkin menjaga kearifan lokal. Sebisa mungkin dalam pemenuhan tenaga kerja, kami mengutamakan karyawan yang berasal dari lokasi setempat yang diyakini memiliki pengetahuan lebih tentang kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan nilai tambah tersebut, kami dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga lokal yang ingin bergabung dengan Perusahaan. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan demi menjaga keberlangsungan usaha kami.

[GRI 102-10]

Tidak hanya mengutamakan karyawan dari lokasi atau daerah setempat saja, kami juga senantiasa menggunakan jasa dan material yang pembeliannya diutamakan dari pemasok lokal di lokasi operasional masing-masing. Pengadaan barang dan jasa dari pemasok lokal dilakukan dengan pertimbangan atas kualitas, harga dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. [GRI 102-9][GRI 102-10]



The background features a light gray geometric pattern of interlocking triangles at the bottom. In the upper right, there are two large, light gray gear icons. On the left side, there are faint outlines of a laptop and a tablet. A large green circle with a dark blue border and a white inner ring contains the number '04'. A horizontal line, green on the left and dark blue on the right, extends from the bottom of the green circle.

04

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

kami berkomitmen agar kami bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mewujudkan komitmen itu, Perusahaan menyelenggarakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dan Bina Lingkungan (PKBL).

Kami memaknai tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis Perusahaan dan minat seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders). Sebagai institusi bisnis, telah tertanam bahwa tujuan usaha Perusahaan bukan sekadar mengejar keuntungan semata, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. komitmen Indonesia Re menjadi jiwa dari seluruh aktivitas Perusahaan dalam menjalankan bisnis, meningkatkan efisiensi dan dapat menjadi nilai tambah bagi citra perusahaan serta tanggung jawab sosial bagi lingkungan. [GRI 103-1]

Program CSR merupakan implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. TJSL adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, PKBL merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 20 Juli 2017.

Mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN tersebut di atas, yang dimaksud dengan Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sementara Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Dana Program Kemitraan BUMN, berdasarkan pasal 9 ayat (1) disalurkan dalam bentuk:

- Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/ atau pembelian aset dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek

dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

Dana Bantuan Program Bina Lingkungan BUMN, berdasarkan Pasal 9 ayat (3) disalurkan dalam bentuk:

- Bantuan korban bencana alam;

- Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;

- Bantuan peningkatan kesehatan;

- Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;

- Bantuan sarana ibadah;

- Bantuan pelestarian alam;

- Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;

- Penyediaan sarana air bersih;

- Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;

- Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;

Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;

Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau Bantuan peralatan usaha.

Seluruh kegiatan yang kami aktualisasikan bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup serta membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara Profit, People, Planet (3P)

Visi dan Misi CSR



01 VISI

Menjadi mitra dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, serta turut melestarikan lingkungan hidup dan membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.



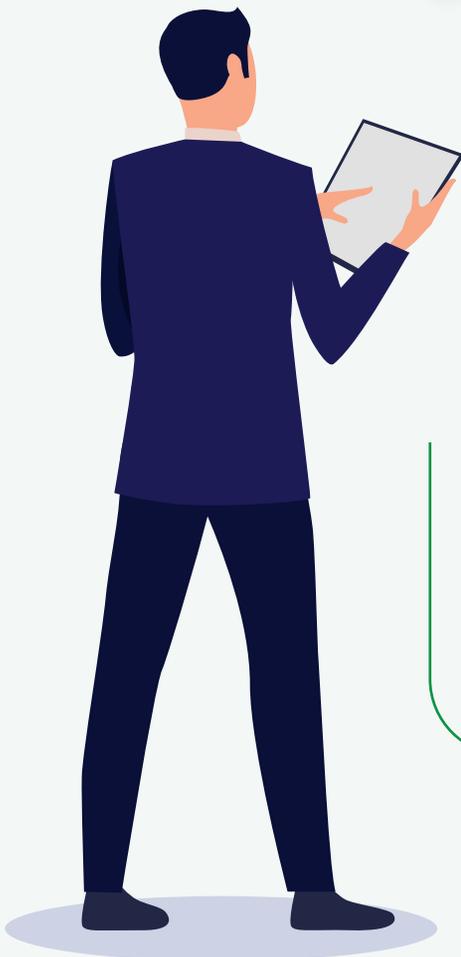
02 MISI

Memberikan bantuan sosial ekonomi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Perusahaan.

Melakukan pemberdayaan keluarga-keluarga ekonomi bawah melalui pembiayaan mikro dan pelatihan serta pendampingan.

Turut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan tinggi.

Menjaga keseimbangan dari 3P (Profit, People, Planet).



Strategi Pelaksanaan Program CSR dan PKBL

Dalam pelaksanaannya program CSR dan PKBL yang kami lakukan selalu bersandar pada kebijakan yang telah digariskan melalui roadmap yang meliputi regulasi, konsep, dan standardisasi pelaksanaannya. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial, kami terus berupaya mengoptimalkan hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Organisasi dan lain-lain melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dirancang dengan seksama. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dimaksudkan agar program yang dilaksanakan tepat guna dan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat serta membuat masyarakat sekitar turut terlibat menjadi pelaku program. [\[GRI 203-1\]](#)

Peran Indonesia Re dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Dalam pelaksanaannya program CSR dan PKBL yang kami lakukan selalu bersandar pada kebijakan yang telah digariskan melalui roadmap yang meliputi regulasi, konsep, dan standardisasi pelaksanaannya. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial, kami terus berupaya mengoptimalkan hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Organisasi dan lain-lain melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dirancang dengan seksama. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dimaksudkan agar program yang dilaksanakan tepat guna dan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat serta membuat masyarakat sekitar turut terlibat menjadi pelaku program. [\[GRI 203-1\]](#)

Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial

Sepanjang tahun 2020, realisasi anggaran yang dikeluarkan oleh Indonesia Re untuk kegiatan CSR serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah sebesar Rp 8,08 miliar. Dari angka tersebut, Perusahaan menyalurkan untuk Program

Kemitraan sebesar 56,7 %, kemudian untuk Program Bina Lingkungan 38,5 %, dan 4,8 % sisanya untuk CSR. Penyaluran dana CSR dan PKBL tahun 2020 lebih rendah sebesar 47,5 % dari realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp 15,4 miliar. [\[GRI 203-1\]](#)

Mengacu pada penerapan kegiatan-kegiatan CSR dan PKBL di tahun-tahun sebelumnya, kami selalu senantiasa melakukan perbaikan serta evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program CSR dan PKBL.

	2020
 Program Kemitraan	4.580.000
 Program Bina Lingkungan	3.119.106
Bencana Alam	0
Pendidikan & Pelatihan	1.438.275
Peningkatan Kesehatan	398.905
Prasarana Umum	314.766
Sarana Ibadah	75.000
Pelestarian Alam	352.425
Sosial Kemasyarakatan	539.736
 CSR	385.711
Bantuan Siswa Berprestasi	110.200
Bantuan Beasiswa IPB	100.000
Bantuan Qurban	63.083
Bantuan Anak Yatim	60.000

Bantuan Pendidikan Seminar Matematika UI	25.000
Bantuan Sosial	5.000
Bantuan Sembako	22.428

Jumlah**8.054.817**

Program Kemitraan ^{[GRI 203-1][GRI 203-2]}

Secara khusus, Program Kemitraan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil Mitra Binaan agar menjadi tangguh dan mandiri, sekaligus memberikan efek berantai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Sasaran dari Program Kemitraan adalah para pelaku UKM yang bergelut di sektor usaha seperti Industri, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Jasa. Dalam Program Kemitraan, Perusahaan memberikan pelatihan dan pinjaman bergulir sesuai

dengan spesifikasi serta perkembangan dan potensi usaha.

Realisasi Rencana Kerja Program Kemitraan tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai sebesar Rp 4,6 miliar atau 52,29 % dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2020, yaitu sebesar Rp 8,8 miliar. Realisasi Program Kemitraan tahun 2020 juga menurun sebesar 39,31 % dari Realisasi tahun 2019 sebesar Rp 11.650.730.000,-.

Berdasarkan persebaran wilayah dan realisasinya sepanjang 2020 adalah sebagai berikut:

Provinsi	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Pencapaian Tahun 2020 Terhadap Tahun 2019
01 Sulawesi Selatan	0	500.000.000	0.00 %
02 Jawa Tengah	0	1.050.000.000	0.00 %
03 DI Yogyakarta	0	1.000.000.000	0.00 %
04 Jawa Timur	0	1.000.000.000	0.00 %
05 Sumatera Barat	0	0	0.00 %
06 Lampung	1.300.000.000	0	0.00 %
07 Kalimantan Barat	750.000.000	0	75.00 %
08 DKI Jakarta	1.500.000.000	0	142,86 %
09 Jawa Barat	1.000.000.000	0	100.00 %
Total	4.550.000.000	3.550.000.000	128,17 %

Keterangan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Pencapaian Tahun 2020 Terhadap Tahun 2019
10 Hibah Khusus BUMN	0	8.000.000.000	0,00 %
11 Dana Pembinaan Kemitraan	30.000.000	100.730.000	29,78 %
Total	30.000.000	8.100.730.000	0,37 %
Total	4.580.000.000	11.650.730.000	39,31 %

Realisasinya Berdasarkan sektor usaha sepanjang 2020 :

Sektor Usaha	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Pencapaian Tahun 2020 Terhadap Tahun 2019
01 Industri	700.000.000	615.151.515	146,31 %
02 Perdagangan	450.000.000	0	0,00%
03 Pertanian	650.000.000	0	0,00%

Sektor Usaha	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Pencapaian Tahun 2020 Terhadap Tahun 2019
04 Peternakan	1.000.000.000	1.500.000.000	51,28%
05 Perkebunan	0	0	0.00%
06 Perikanan	1.750.000.000	1.438.848.485	121,96 %
07 Jasa	0	0	0.00%
08 Lainnya	0	0	0.00%
Total	4.550.000.000	3.550.000.000	128,17 %
09 Hibah Khusus BUMN	0	8.000.000.000	0.00 %
11 Dana Pembinaan Kemitraan	30.000.000	100.730.000	29,78 %
Total	30.000.000	8.100.730.000	0,37 %
Total	4.580.000.000	11.650.730.000	39,31 %

Sebanyak Rp 4,6 miliar tersebut disalurkan untuk 83 mitra binaan, dengan rincian sebagai berikut:

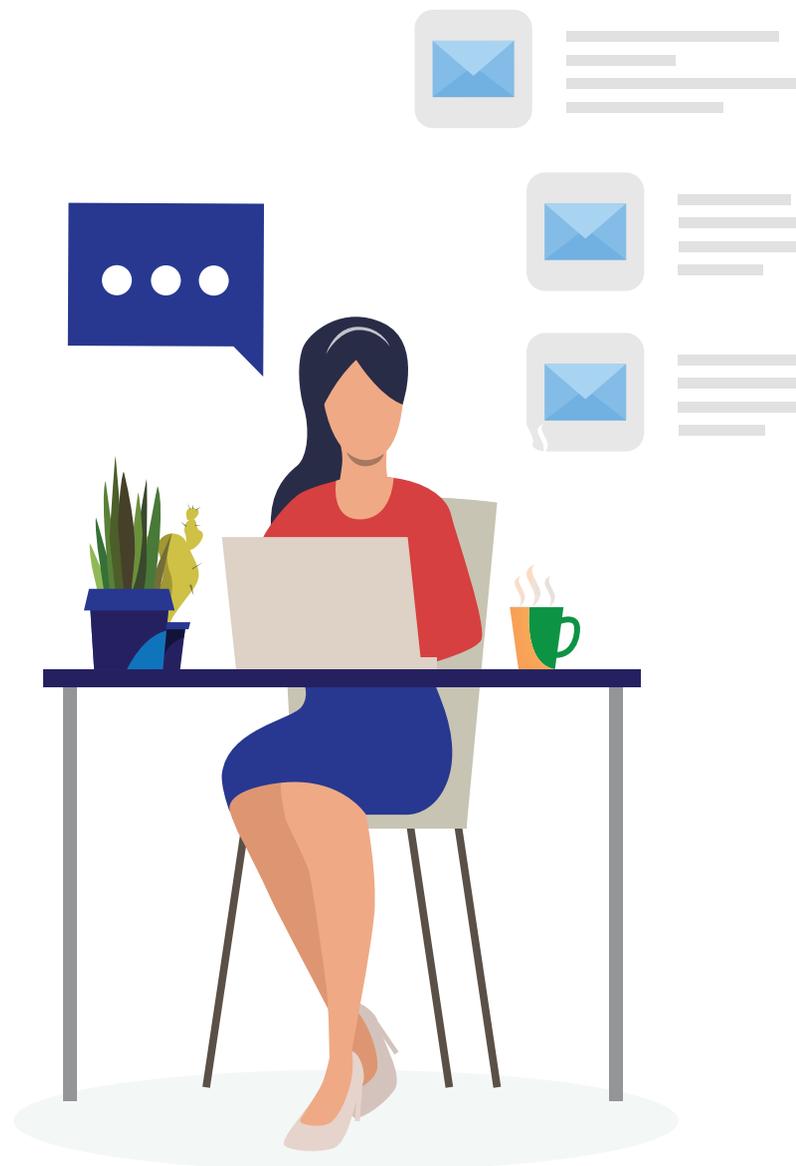
Nama Individu/Kelompok Mitra Binaan	Provinsi	Kabupaten/Kotamadya	Sektor	Jumlah Mitra Binaan
Kelompok Tani Cilaja	Jawa Barat	Bandung	Sektor Pertanian	13
Moci An - Nur	Jawa Barat	Sukabumi	Sektor Industri	1
Aneka Usaha Koperasi Khasanah	Jawa Barat	Sukabumi	Sektor Industri	9
Kelompok Mebel	DI Yogyakarta	Bantul	Sektor Industri	10
Lele Mina Sejahtera	DI Yogyakarta	Bantul	Sektor Perikanan	10
Nila Sembada	DI Yogyakarta	Sleman	Sektor Perikanan	10
Kelompok Lele Boyolali	Jawa Tengah	Boyolali	Sektor Perikanan	10
Kelompok Sapi Perah Jombang	Jawa Timur	Jombang	Sektor Peternakan	20

Program Bina Lingkungan



Fokus Program Bina Lingkungan adalah pada program pemberdayaan sosial yang ditujukan untuk memberi bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Program Bina Lingkungan yang kami lakukan meliputi kegiatan-kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Program Bina Lingkungan antara lain, pemberian bantuan untuk daerah bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan bagi masyarakat dan mitra binaan, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan sarana dan prasarana umum, termasuk sarana dan prasarana umum, termasuk tempat ibadah. [\[GRI 203-1\]](#)[\[GRI 203-2\]](#)

Hingga berakhirnya tahun buku, Perusahaan telah melaksanakan program Bina Lingkungan yang terbagi menjadi beberapa sektor dengan total penyaluran sebesar Rp 3,1 miliar. Dibandingkan dengan target dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2020 yang sebesar Rp 3,0 miliar, realisasi dana Bina Lingkungan tahun 2020 mencapai 103,97 %. Berikut rincian realisasi anggaran Bina Lingkungan berdasarkan sektor bantuan.



Sektor	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Pencapaian Tahun 2020 Terhadap Tahun 2019
01 Bencana Alam	549.473.151	0	0.00 %
02 Pendidikan & Pelatihan	643.912.005	1.438.275.00	233,37 %
03 Peningkatan Kesehatan	0	398.904.728	0.00 %
04 Pembangunan Prasarana Umum	1.440.000	314.765.750	37,49 %
05 Sarana Ibadah	165.000.000	75.000.000	45,45 %
06 Pelestarian Alam	36.063.500	352.424.600	977,23 %
07 Sosial Kemasyarakatan	797.516.500	539.736.000	67,68 %
Total	3.119.106.078	3.031.620.156	102,89 %

Realisasinya Berdasarkan sektor usaha sepanjang 2020 :

Provinsi	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Pencapaian Tahun 2020 Terhadap Tahun 2019
01 Sumatera Barat	-	75.000.000	0,00 %
02 DKI Jakarta	1.248.475.478	1.021.157.605	122,26%
03 Jawa Barat	1.263.856.000	360.911.000	350,18%
04 Jawa Tengah	404.924.600	267.045.000	151,63%
05 D.I. Yogyakarta	86.700.000	100.000.000	86,70%
06 Gorontalo	-	665.200.000	0,00%
07 Maluku	-	44.061.151	0,00%
08 Jawa Timur	65.150.000	57.833.400	0,00%
09 Papua	-	50.000.000	0,00%

10	Bengkulu	-	15.000.000	0,00%
11	Sulawesi Tengah	-	360.412.000	0,00%
12	Sulawesi Tenggara	-	15.000.000	0,00%
13	Banten	25.000.000	0	-
14	Nusa Tenggara Barat	25.000.000	0	-
Total		3.119.106.078	3.031.620.156	102,89 %



CSR

Selain PKBL, Perusahaan juga melakukan tanggung jawab sosialnya melalui kegiatan CSR. Program CSR dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 00067/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Sepanjang tahun 2020, kami menyalurkan Rp 385,7 juta atau 38,6 % dari anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun 2020. Sementara itu, dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp 685,6 juta, realisasi 2020 mengalami perubahan sebesar 56,2%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Realisasi CSR [GRI 203-1][GRI 203-2]

Kegiatan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Pencapaian Tahun 2020 Terhadap Tahun 2019
01 Program Kementerian BUMN	0	261.574.314	0%
02 Program Indonesia RE	333.283.000	172.328.000	193,4%
03 Program Lain - Lain	52.428.200	251.687.270	20,8%
Total	385.711.200	685.589.584	56,2%

*dalam ratusan ribu rupiah



Tata Kelola Perusahaan yang Baik



Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan fondasi komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Kami menyusun dan mengimplementasikan praktik-praktik tata kelola yang dijalankan dengan standar integritas tinggi dengan tujuan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang dan mengembangkan pasar asuransi. Kami percaya bahwa GCG merupakan faktor penting dalam industri reasuransi dalam hal memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan ceding company. Implementasi GCG juga dirasakan penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri reasuransi.

[GRI 301-1]

Kami mengharapkan dapat menjadi perusahaan yang sehat dan terus bertumbuh dengan mengedepankan GCG dan pengelolaan risiko yang baik. Penerapan GCG Perusahaan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

1. Transparansi

Merupakan bentuk keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan. Kami menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan sarana komunikasi yang akurat, efektif, dan responsif dalam

memperoleh informasi mengenai Perusahaan sehingga seluruh pemangku kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan yang kami lakukan.

2. Akuntabilitas

Prinsip ini mencerminkan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Kami menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap karyawan sehingga seluruh aksi dan kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban kami wujudkan dalam bentuk kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Kami menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga maupun pihak di luar ketentuan yang telah disepakati.

4. Kemandirian

Merupakan suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Korporasi. Kami menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai Perusahaan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip ini merepresentasikan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami menerapkan prinsip kewajaran dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Komitmen Tata Kelola Perusahaan

Komitmen tata kelola perusahaan yang baik diwujudkan melalui langkah-langkah untuk mempromosikan dan mengelola GCG sebagai bagian penting dari budaya dan nilai-nilai untuk diadopsi oleh seluruh karyawan di semua tingkatan organisasi. Hal itu juga didukung oleh kecukupan sistem dan infrastruktur yang mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG antara lain dengan memiliki sejumlah pedoman yang terkait dengan GCG, yang meliputi:

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GOCG)

Pedoman Etika dan Perilaku (COEC)

Pedoman Direksi (BOD Manual)

Pedoman anti kecurangan (Fraud)

Pedoman pengendalian gratifikasi

Pedoman Pengenalan Direksi

Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)

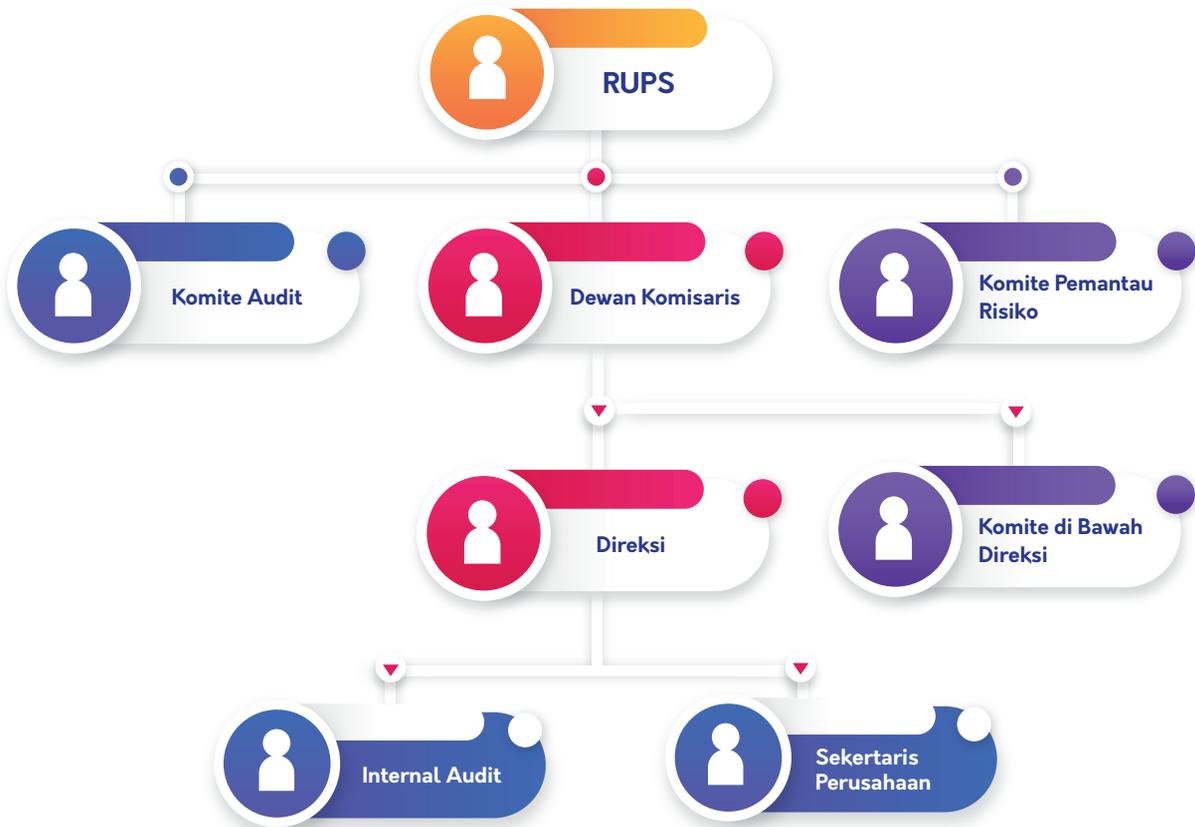
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)

Piagam Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka Tata Kelola Indonesia Re [GRI 102-18]

Sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur Tata Kelola Perusahaan digambarkan pada organ utama perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, dimana organ Utama Perusahaan yang tertinggi di dalam

Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Organ pendukung terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko serta Komite komite di bawah Direksi.



Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola sebagai forum bagi pemegang saham untuk menyetujui dan mengesahkan hal-hal penting berkenaan dengan kepentingan perusahaan, sesuai ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2020 Indonesia Re menyelenggarakan 2 kali RUPS, yaitu terdiri dari RUPS Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2020 dan RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan 2019

01**Pemegang Saham**

Pemegang Saham Indonesia Re adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan 100% kepemilikan saham Perusahaan.

**02****Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris bertanggung jawab memberikan saran dan pengawasan pada Direksi dalam menyusun strategi dan mengelola perusahaan, termasuk dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan. Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar masing-masing perusahaan.

Secara keseluruhan, RUPS merupakan organ yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang bersangkutan. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam tahun buku yang dituangkan dalam Laporan Tahunan dan disampaikan dalam RUPS.



03

Direksi

Direksi mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan operasional perusahaan sehari-hari agar sejalan dengan tujuan perusahaan. RUPS mengangkat Direksi untuk bekerja selama jangka waktu 5 tahun yang berlangsung dari tanggal yang ditentukan pada RUPS yang bersangkutan. Setelah mencapai akhir masa jabatan maka RUPS bisa diangkat Kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi

Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan untuk memastikan pertumbuhan dan kesinambungan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Tanggung jawab Direksi adalah mengelola Perusahaan secara efektif dan efisien, serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar. Direksi juga bertanggung jawab dalam pengawasan, pengelolaan, dan pemantauan isu-isu lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan (Environmental, Social and Corporate Governance/ ESG).

Kriteria Penilaian GCG

Indonesia Re memiliki kriteria penilaian yang digunakan dalam penilaian penerapan GCG, yang mencakup:



Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian penerapan GCG kami pada tahun 2019 dilakukan secara mandiri (self-assessment), namun juga melakukan pendampingan oleh konsultan independen yakni PT Servitama Konsultan.

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik yang telah kami lakukan juga ditunjukkan dengan hasil kinerja positif pada tahun 2020. Kami membuktikan

bahwa kami telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang selaras dengan pengelolaan risiko menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dengan komitmen tinggi terhadap penerapan GCG sepanjang tahun buku telah menghasilkan kinerja yang sangat memuaskan, antara lain: Aset tumbuh sebesar 7,23 %, ekuitas tumbuh sebesar 6,29 %, Risk Based Capital 214,9 %, Tingkat Kesehatan Perusahaan

memperoleh skor 70,00 digolongkan dalam kondisi “SEHAT” kategori “A” serta hasil Assessment penerapan GCG tahun 2020 memperoleh skor 90,42 % dengan klasifikasi ”Sangat Baik”.

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Selain penilaian GCG yang kami lakukan setiap tahunnya, Kementerian BUMN juga melakukan penilaian terhadap kami. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing BUMN, Kementerian BUMN memutuskan untuk membangun dan mengimplementasikan sistem pengelolaan dan pengendalian Kinerja BUMN berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Hal ini dituangkan melalui Surat Kementerian Negara BUMN No. S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN.

Hasil Asesmen penerapan GCG tahun 2020 memperoleh skor 90,42 % dengan klasifikasi ”Sangat Baik”.

Assesment menggunakan kriteria KPKU versi Tahun 2017 yang mengadopsi dan mengadaptasi “Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence”. Penilaian KPKU tersebut sebagai tolok ukur kami untuk merancang keunggulan kinerja organisasi, mendiagnosis sistem manajemen kinerja secara keseluruhan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi, serta menilai upaya perbaikan kinerja.



Hasil Penilaian

Pada tahun 2020, kami mendapatkan skor 536,25 dengan kategori “Good Performance”. Skor tersebut sama dengan capaian skor pada tahun sebelumnya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Kategori	Maksimal Skor	%	Skor Minimal
Kategori 1: Kepemimpinan			
Kepemimpinan Senior	70	55	38,5
Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat	50	55	27,5
Kategori 2: Perencanaan Strategis			
Pengembangan Strategi	45	60	27,0
Implementasi Strategi	40	60	24,0
Kategori 3: Fokus Pelanggan			
Suara Pelanggan	40	55	22,0
Keterikatan Pelanggan	45	55	24,75
Kategori 4: Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan			
Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan	45	55	24,75

Kategori	Maksimal Skor	%	Skor Minimal
Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi	45	55	24,75
Kategori 5: Fokus Tenaga Kerja			
Lingkungan Tenaga Kerja	40	55	22,00
Keterikatan Tenaga Kerja	45	55	24,75
Kategori 6 : Fokus Operasi			
Proses Kerja	45	55	24,75
Efektivitas Operasional	40	55	22,0
Kategori 7: Dimensi Hasil			
Hasil/Kinerja Produk dan Proses	120	50	60,00
Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan	80	50	40,00
Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja	80	50	40,00
Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola	80	50	40,00
Hasil/Kinerja Kerja Finansial dan Pasar	90	55	49,50
Total			536,25

Fungsi Kepatuhan

[GRI 205-2]



Komitmen kami dalam mengimplementasikan aspek dan fungsi kepatuhan dalam mengelola risiko kepatuhan untuk setiap aktivitas usaha dan operasional Perusahaan. Pelaksanaan tersebut mengacu pada peraturan-perundangan yang berlaku, antara lain:

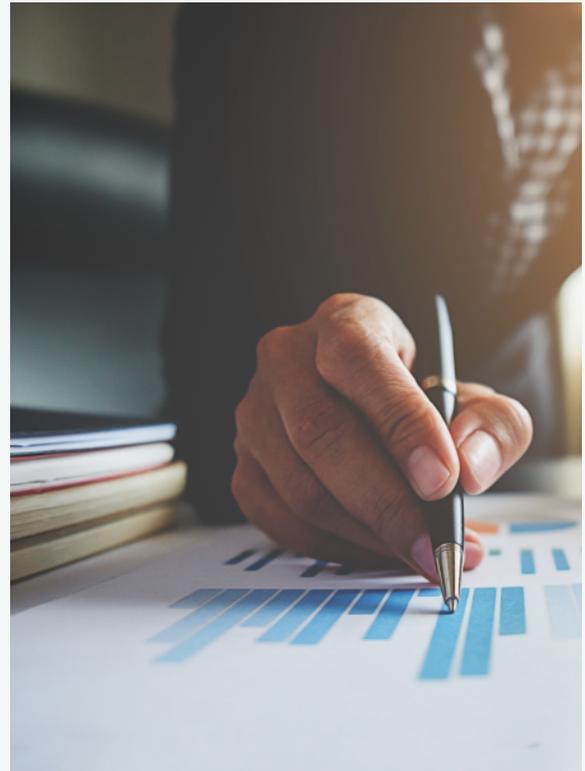
- 01 UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007.
- 02 UU RI No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 03 Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.
- 04 POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- 05 SEOJK No. 14/SEOJK.05/2016 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- 06 POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- 07 SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, direksi terlibat dalam pelaksanaannya. Direksi kami berusaha menjadi role model dalam pelaksanaan kepatuhan, Semua Direksi kami menandatangani pakta integritas untuk menjalankan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.

Dalam pelaksanaannya, fungsi kepatuhan di lingkungan Kami dipimpin oleh Risk Management & Quality Assurance Division

Head. Fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai yang diatur oleh Perusahaan yakni mengelola sistem manajemen kepatuhan melalui pengintegrasian kewajiban kepatuhan dalam kebijakan prosedur dan proses untuk memastikan seluruh kegiatan perusahaan, sistem pelaporan dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan evaluasi kebijakan sistem manajemen kepatuhan agar efektif dan responsif terhadap perubahan yang ada.

Dalam rangka memenuhi seluruh ketentuan regulator serta praktik terbaik yang diterapkan di lingkungan kami, fungsi kepatuhan yang kami punya sudah memiliki sistem yang memuat seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal. Kami juga telah menjalankan sosialisasi mengenai gratifikasi bersama KPK untuk seluruh karyawan kami serta diperkuat dengan penandatanganan Pakta Integritas. Selain itu, fungsi kepatuhan juga memiliki inisiatif baru berupaya penyusunan Indikator Kepatuhan di seluruh unit Perusahaan. Indikator Perusahaan berfungsi untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan.



Kegiatan Kepatuhan Selama 2020

Selama tahun 2020, kami melakukan kegiatan sosialisasi di bidang kepatuhan : ^[GRI 205-2]

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Karyawan yang Mengikuti Kegiatan
01 Sosialisasi Gratifikasi Oleh KPK	27 Februari 2020	99
02 Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001	24 Juli 2020	157

Anti Pencucian Uang (APU)

Prosedur Customer Due Diligence yang kami terapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku mengenai Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Penerapan ini kami berlakukan ke semua Ceding Companies dan Mitra Kerja Luar Negeri. Kami harus memastikan bahwa klien kami memiliki legalitas dan terhindar dari bisnis Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.





Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. SPI mampu membantu pengendalian atas risiko yang semakin kompleks melalui proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan

Sebagai tindak lanjut dari SPI dan guna memastikan kegiatan usaha kami dapat berjalan dengan baik, maka secara khusus dibentuk Internal Audit. Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsi assurance dan consultancy terkait dengan implementasi GCG di Perusahaan.

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audit bermitra dengan Komite lainnya. Fungsi ini juga menjalankan pola relasi koordinatif dengan Sekretaris Perusahaan. Terkait dengan cara-cara mengendalikan kondisi internal Perusahaan, Internal Audit memiliki kewenangan sebagai berikut:

Menata, mengubah dan melaksanakan kebijakan Audit Internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;

Dapat mengakses seluruh dokumen, pencatatan, karyawan, informasi objek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapat data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

Melakukan verifikasi dan uji keandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;

Berkerja sama dengan Komite Audit untuk memberikan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

Internal Audit tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas aktivitas yang di-review atau diaudit, akan tetapi tanggung jawab pada penilaian dan analisis atas aktivitas tersebut.



Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan COSO

Kami melakukan proses penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) sesuai dengan framework dari Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commissions (COSO). Pihak internal audit melakukan review atas aktivitas Perusahaan, mengidentifikasi risiko Perusahaan yang memang perlu untuk diaudit, mengukur tingkat

efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pada Perusahaan, serta menentukan faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan audit pada Perusahaan dan bertanggung jawab pelaksanaan audit pada Perusahaan dan bertanggung jawab terhadap Manajemen.

Pelaporan Pelanggaran



Whistleblowing System (WBS) merupakan sistem yang diperuntukkan bagi para pemangku kepentingan untuk mengungkapkan penyimpangan termasuk kegiatan yang mencurigakan. WBS juga menjadi sarana komunikasi bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan informasi kepada Internal Audit mengenai tindakan (perbuatan/perilaku/kejadian) yang tidak beretika, perselisihan, maupun melanggar pedoman perilaku yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kami.

Kami akan melindungi identitas pelapor yang melaporkan adanya Tindakan atau potensi terjadinya korupsi. Hasil Whistleblowing system kami kelola dengan secara profesional dan independen. Sistem ini dibuat guna menghindari konflik atau perselisihan dan mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang timbul.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Laporan pelanggaran atas dugaan pelanggaran akan dilakukan secara

rahasia, konsisten dengan kebutuhan penyidikan lebih lanjut dan identitas dari pelapor tidak akan diungkapkan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Kami menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang tertuang dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran. Pedoman ini berisi panduan untuk mengelola pengaduan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis yang disampaikan secara rahasia, anonim dan independen oleh para pemangku kepentingan dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

rahasia, konsisten dengan kebutuhan penyidikan lebih lanjut dan identitas dari pelapor tidak akan diungkapkan.

Stakeholder/whistleblower dalam menyampaikan laporan tidakan pelanggaran dapat melalui sarana yang ditujukan kepada:



Surat yang ditujukan kepada Chief Internal Audit , dalam amplop tertutup dan ditulis di pojok kiri atas **“RAHASIA PRIBADI”**, dialamatkan ke :

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Gedung Indonesia Re

Jl. Salemba Raya No. 30

Jakarta Pusat 10430, Indonesia

Up: Chief Internal Audit

Email:

auditor@indonesiare.co.id

Website:

www.indonesiare.co.id atau www.lapor.go.id



Ruang Lingkup Whistleblowing System (WBS)

Ruang lingkup WBS yang diterapkan di lingkungan kami mencakup penyimpangan atau pelanggaran yang terkait dengan etika bisnis dan etika kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), peraturan hukum atau perundang-undangan dan perasuransian. Berikut adalah struktur pengelola WBS di lingkungan Perusahaan :



Perusahaan akan memberikan perlindungan kepada whistleblower yang laporannya terbukti kebenarannya. Perlindungan yang diberikan oleh kami mencakup:



Bagi pelapor internal, kami akan memberikan jaminan perlindungan tidak akan dikenai pemecatan, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, serta catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record). Selain itu, kami juga akan mengupayakan perlindungan hukum kepada pelapor yang beritikad baik sebagaimana ketentuan yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Penanganan Pengaduan

Kami mengatur setiap pelaporan yang disampaikan oleh whistleblower harus dapat dipertanggungjawabkan dan bukan bersifat fitnah yang mencemarkan nama baik dan/atau reputasi seseorang. Oleh karena itu, pelaporan yang ada wajib memenuhi persyaratan berikut:

- Disampaikan secara tertulis melalui media yang tersedia.
- Memuat indikasi awal mengenai tindakan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

What

Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui (what);

Where

Di mana perbuatan tersebut dilakukan (where);

When

Kapan perbuatan tersebut dilakukan (when);

Who

Siapa saja pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut (who);

How

Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (how).

Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:

- Fraud;
- Pelanggaran hukum (ketentuan perundang-undangan);
- Pelanggaran Peraturan Perusahaan;
- Pelanggaran Kebijakan Perusahaan;
- Pelanggaran Code of Conduct, termasuk pelanggaran tata nilai Perusahaan dan benturan kepentingan.

Laporan yang disampaikan tersebut diharapkan dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan. Apabila semua syarat tersebut terpenuhi, Komite Audit akan mengadakan rapat khusus untuk menilai dan menentukan apakah pengaduan yang masuk memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Rapat khusus ini dilakukan paling lambat pada minggu kedua sejak diterimanya laporan.

Kode Etik



Kredibilitas, kepercayaan publik, pemilik modal, dan pelanggan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha kami. Jika kredibilitas kami dan kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders) hilang maka berpotensi menekan potensi peluang bisnis yang dapat mengancam kelangsungan usaha kami.

Kredibilitas kami dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku kami dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Dalam pengelolaan kami selalu patuh pada peraturan dan perundangan yang berlaku serta harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perusahaan.

Pedoman Etika digunakan oleh seluruh karyawan kami sebagai landasan dalam membentuk dan mengatur tingkah laku yang konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam maupun di luar Perusahaan.

Pokok-pokok Kode Etik

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Ethic and Conduct) yang kami susun mengandung pokok-pokok kode etik, yang terdiri dari:



Komitmen Perusahaan terhadap pemangku kepentingan, karyawan, pemegang saham, tertanggung, pemasok, customer, masyarakat dan lingkungan, mitra usaha, pemerintah, pesaing dan media massa.



Komitmen dan perilaku kerja karyawan kami sebagai atasan, bawahan, dan rekan kerja.



Etika bisnis perusahaan.



Penerapan dan penegakan Pedoman Etika dan Perilaku.

Pernyataan bahwa Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Kode Etik berlaku bagi seluruh level organisasi dan seluruh karyawan Perusahaan. Dalam rangka menjaga komitmen secara berkelanjutan, kami mewajibkan bagi setiap karyawan untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan. Hal tersebut diterapkan melalui penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi, serta karyawan tetap.

Penyebarluasan dan Sosialisasi Kode Etik Perusahaan

Kode Etik kami telah disebarluaskan disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan. Penyebarluasan dan Sosialisasi atas Kode Etik Perusahaan dimaksudkan untuk mendukung kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap perilaku-perilaku yang sesuai dengan peraturan yang mengikat tersebut. Setiap karyawan yang baru direkrut akan memperoleh dokumen Kode Etik dan

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Bagi karyawan yang melakukan pelanggaran Kode Etik Perusahaan maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil laporan HCCS Division yang ditetapkan sesuai ketentuan Perusahaan.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Pada tahun pelaporan tidak terdapat pelanggaran kode etik. [GRI 205-3]

Pemberian Dana Kegiatan Politik

Kami tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik mana pun. Meskipun demikian, kami menjamin seluruh karyawan kami untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Program Anti Korupsi

Kami menilai bahwa korupsi tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan. Korupsi juga bertentangan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, kami menerapkan kebijakan anti korupsi yang



diberlakukan untuk seluruh karyawan tanpa terkecuali didasari oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagi Indonesia Re, korupsi tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan. Korupsi juga bertentangan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan kebijakan anti korupsi yang diberlakukan untuk seluruh karyawan tanpa terkecuali didasari oleh



Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka mendukung komitmen tersebut, Perseroan telah memiliki program anti korupsi. Hal itu, antara lain diwujudkan dalam beragam kegiatan yang mencakup sosialisasi dan penandatanganan Pakta Integritas.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Kami memiliki dua pedoman yang harus dipatuhi terkait dengan pengendalian keuangan, yaitu:

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Pedoman ini memberikan panduan kepada seluruh insan Indonesia Re untuk memahami landasan hukum, pengertian umum, tujuan dan manfaat, ruang lingkup gratifikasi, penghargaan dari mitra kerja, membina hubungan baik dengan mitra kerja, mekanisme pelaporan serta pemantauan dan sanksi atas pelanggaran.

Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pedoman ini memuat tentang panduan bagi seluruh insan Indonesia Re untuk memahami tujuan dan manfaat, pengertian umum, pelaporan LHKPN, pemantauan pelaporan LHKPN, hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Perusahaan, dan sanksi atas pelanggaran.



Sementara itu, dari sisi pengendalian operasional, Perusahaan memiliki pedoman sebagai berikut:



Underwriting Guidelines

Pedoman ini memberikan panduan bagi para underwriter Perusahaan dalam bisnis reasuransi.



Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Pedoman ini memuat tentang acuan bagi pelaksana pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.



Kebijakan Gratifikasi

Sebagai bentuk komitmen kami untuk menerapkan etika bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG, maka kami menerapkan program pengendalian gratifikasi. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh karyawan kami terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme para stakeholder.

Prinsip Dasar Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip utama yang dianut oleh kami, yang meliputi:

01. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi (keterbukaan) tercermin dari adanya mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi kepada KPK. Mekanisme pelaporan merupakan sarana untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya

selaku penyelenggaraan negara. Namun demikian, ketika pelaporan tersebut masuk ke dalam proses penanganan penetapan statusnya oleh KPK, maka prinsip keterbukaan dapat dikesampingkan dengan memandang kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan bagi pelapor gratifikasi.

02. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas diimplementasikan sebagai bentuk kewajiban penyelenggara negara yang diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam jabatan yang diembannya, untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun terkait dengan jabatannya dan melaporkan kepada KPK dalam hal terdapat penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

03. Prinsip Kepastian

Hukum Prinsip ini mengandung makna bahwa proses penerimaan laporan, pencarian informasi, telaah/analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan status kepemilikan gratifikasi yang disampaikan oleh KPK memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pelapor terhadap gratifikasi yang diterima.

04. Prinsip Kemanfaatan

Prinsip ini terkait dengan aspek pemanfaatan barang gratifikasi, yaitu bahwa barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara dimanfaatkan untuk kepentingan Negara, sedangkan gratifikasi yang tidak dianggap suap tetapi terkait dengan kedinasan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan sosial.

05. Prinsip Kepentingan umum

Prinsip kepentingan umum diwujudkan dari sikap tidak meminta atau menerima pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan atau

pekerjaan yang dilakukan. Apabila dalam hal tertentu terjadi penerimaan, maka penerimaan tersebut wajib dilaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut merupakan bentuk sikap penyelenggara negara yang mengesampingkan kepentingan pribadi dan tetap konsisten menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat umum.

06. Prinsip Independensi

Prinsip independensi ditunjukkan dengan sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apa pun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK. Pelaporan tersebut dapat memutus potensi pengaruh pada independensi penerimaan gratifikasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

07. Prinsip Perlindungan Pelapor Gratifikasi

Instansi atau lembaga tempat pelapor gratifikasi bekerja juga wajib memberikan perlindungan dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor



Kategori Gratifikasi

Kami membagi kategori gratifikasi sebagai berikut:

Suap

Suatu perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya, antara lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bentuk-bentuk suap dapat berupa uang, hadiah, barang, pemberian jabatan kepada keluarga ataupun bentuk lainnya yang merupakan imbalan. Setiap insan Indonesia Re tidak diperbolehkan untuk menerima atau memberikan suap, yaitu: Mempengaruhi keputusan atau mengarahkan seseorang untuk memberikan ataupun menerima suap;

Menawarkan jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan yang sudah ditentukan;

Memberikan fasilitas lebih kepada pihak lain dengan imbalan untuk keuntungan pribadi.

Menerima pemberian atau buah tangan yang ilegal atau tujuan pemberian yang tidak dibenarkan dari pihak mana pun yang ingin, akan dan/atau sedang mengadakan hubungan bisnis dengan Perusahaan;

Tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan suap menurut ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku.

Hadiah

Berbentuk uang atau yang disetarakan yaitu cek, voucher, bilyet giro, barang ataupun pemberian dalam bentuk lainnya yang diberikan oleh atau kepada seseorang karena kedudukannya:

Setiap insan Indonesia Re tidak diperbolehkan untuk menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang melanggar ketentuan yang ada;

Namun hadiah dan cinderamata yang nilainya tidak melebihi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan berkaitan dengan even-even sosial (social events) yang biasanya terjadi tidak reguler dapat diperkenankan, seperti even pernikahan;

Dalam rangka menjaga atau memelihara hubungan bisnis, perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan atas beban perusahaan pada kondisi antara lain yaitu hari raya keagamaan, perayaan ulang tahun kedinasan, pisah-sambut pejabat perusahaan, dan pernyataan simpati;

Bantuan berupa barang harus mencantumkan logo/nama Indonesia Re.

Jamuan Bisnis

Yang dapat diterima/diberikan insan Indonesia Re dalam rangka kegiatan bisnis (menjadi beban perusahaan) adalah jamuan untuk menjalin kerja sama dengan calon pelanggan, pelanggan, supplier, dan mitra bisnis. Insan Indonesia Re dapat memberikan jamuan bisnis atas beban perusahaan dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Bila berupa jamuan, hendaknya jamuan dilakukan di tempat yang tidak menimbulkan citra negatif.

Donasi

Merupakan sumbangan kepada suatu pihak, lembaga, atau organisasi. Donasi untuk tujuan amal dan dalam batas kepatutan dapat dibenarkan. Donasi untuk tujuan lainnya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pelaporan Gratifikasi



Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyuapan melalui Undang-Undang Nasional serta perjanjian internasional seperti Konvensi PBB melawan Korupsi. Meskipun demikian, masih banyak yang bisa dilakukan salah satunya ialah perubahan kelembagaan dan budaya anti-penyuapan di dalam organisasi. Langkah tersebut dapat berkontribusi secara signifikan pada upaya melawan penyuapan.

Demi mendukung hal tersebut dan juga mendukung implementasi SMAP di BUMN pasca dikeluarkannya surat Menteri BUMN No. S-35/MBU/01/2020 dan Surat No. S-17/S/MBU/02/2020 pada 17 Februari 2020 yang mewajibkan seluruh BUMN membangun, menerapkan dan melakukan sertifikasi ISO 37001 SMAP. Pada tahun pelaporan kami menerapkan Sistem manajemen anti penyuapan.

Pelaksanaan SMAP tentunya bukan sekadar karena adanya tuntutan eksternal, akan tetapi lebih bersifat menunjukkan keberadaan internal organisasi/perusahaan yang stabil dan mapan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah memperoleh sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti penyuapan pada tanggal 13 Agustus 2020. Sertifikasi tersebut diberikan oleh PT Asricert Indonesia. Proses sertifikasi tersebut mencakup ruang lingkup

Direktorat Utama, Direktorat Teknik Operasi, Direktorat Keuangan & Sumber Daya Manusia dan Direktorat Pengembangan, Manajemen Risiko & Kepatuhan.

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Sepanjang tahun 2020, kami melakukan kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi sebanyak 1 (satu) kali yakni pada 27 Februari 2020 yang dihadiri oleh Direksi dan seluruh karyawan dengan narasumber langsung dari KPK.

Laporan Pengelolaan Gratifikasi Tahun 2020

Selama tahun 2020, laporan pengelolaan gratifikasi terbatas pada Laporan Tindak Lanjut Internal atas barang terindikasi gratifikasi. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Tahun 2020		
Jumlah	Bentuk	Penyaluran
10	Aneka Kue	Panti Sosial



Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kebijakan Pelaporan LHKPN

Kebijakan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang kami punya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam kapasitas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan juga berkenaan dengan Wajib Lapo Konglomerasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Wajib Lapo LHKPN

Berdasarkan Keputusan Direksi tahun 2017 tersebut, pihak yang wajib lapo LHKPN di konglomerasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) adalah:



Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)



Dewan Komisaris PT Asuransi Asei Indonesia



Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)



Direksi PT Reasuransi Syariah Indonesia



Kepala Divisi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)



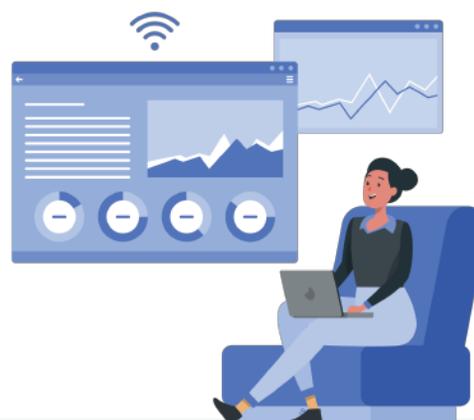
Dewan Komisaris PT Reasuransi Syariah Indonesia



Direksi PT Asuransi Asei Indonesia

Sosialisasi LHKPN

Dikarenakan pada tahun pelaporan, terjadi kondisi darurat kesehatan publik seperti Covid-19 yang sejak bulan Maret 2020 sampai akhir tahun tak kunjung usai, maka kami tidak melakukan sosialisasi LHKPN.



Pelaporan LHKPN 2020

Pada tahun 2020, berikut rincian Pelaporan LHKPN : [\[GRI 205-3\]](#)

Unit Kerja	Wajib Laport (WL)	WL Online	WL Offline	Sudah Laport	Belum Laport	Tepat Waktu	Terlambat	Pelaporan
Dewan Komisaris	2	2	0	1	1	1	0	50%
Pemimpin Tertinggi	1	1	0	0	1	0	0	0,00%
PT. Asuransi Asei Indonesia	2	2	0	1	1	1	0	50%
PT. Reasuransi Utama Indonesia (Persero)	14	14	0	7	7	7	0	50%
PT. Reasuransi Syariah Indonesia	5	5	0	1	4	1	0	20%
Wakil Pimpinan	2	2	0	0	2	0	0	0,00%

Sanksi Laporan LHKPN

Wajib Laport yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan tanggal waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Hal tersebut Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00700/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Tata Cara Pelaporan LHKPN

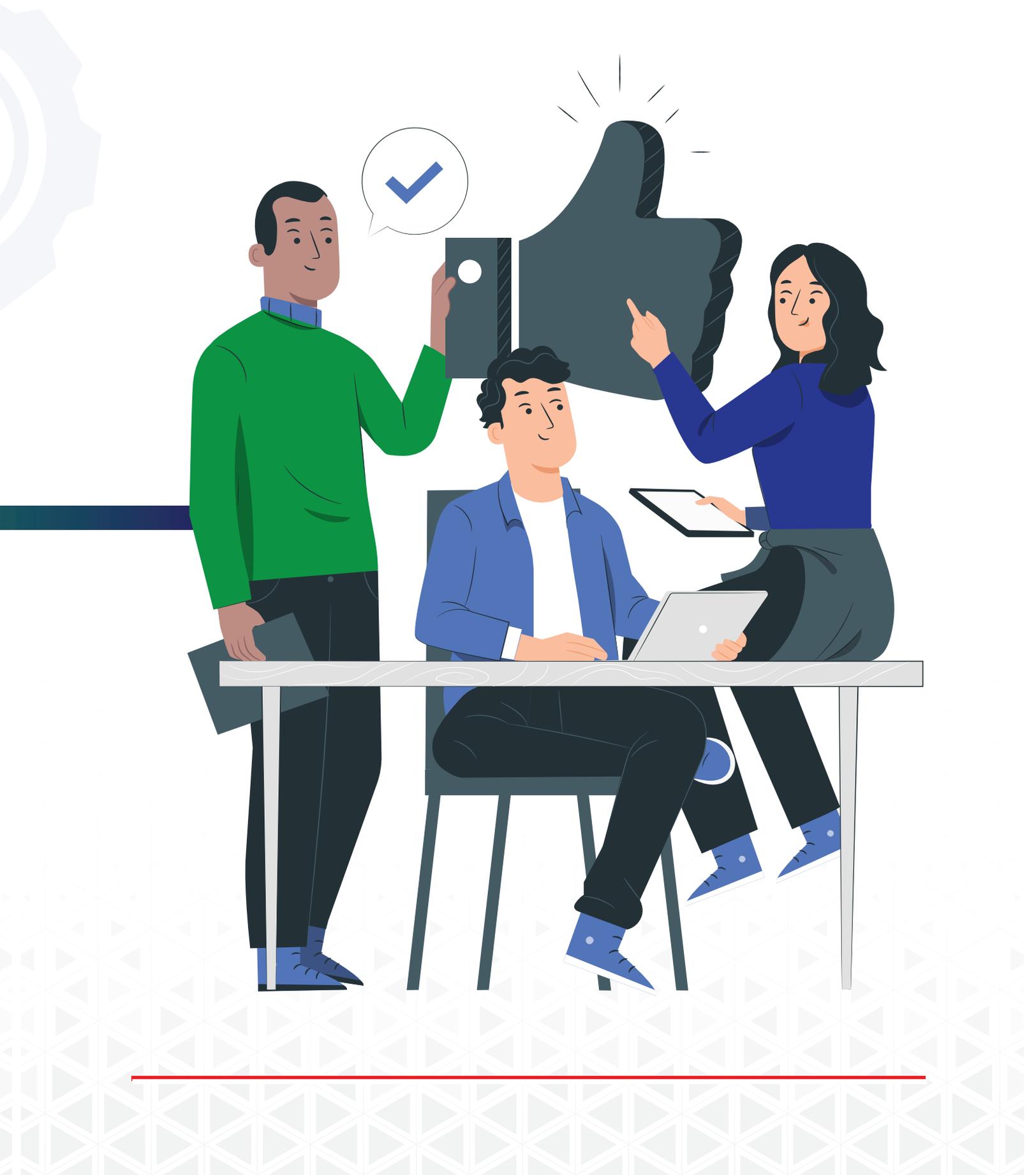
Pelaporan LHKPN dilakukan oleh Wajib Laport secara individual sebelum 31 Maret setiap tahun secara daring (online) melalui website: elhkpn.kpk.go.id Laporan tersebut menggunakan format yang telah ditetapkan serta mekanisme pelaporan pada Surat Keputusan Direksi No. 00700/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017.





Pemangku Kepentingan





Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Tidak dapat dipungkiri pemangku kepentingan sangat penting bagi kami, karena dalam aktivitas bisnis kami sehari-hari selalu berkaitan dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan kami, baik langsung maupun tidak langsung, seperti pemegang saham, pegawai, penyewa (lessee), penyedia barang dan jasa, masyarakat di sekitar tempat usaha, pemerintah, dan masyarakat secara luas.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 dalam hubungan dengan pemangku kepentingan, kami wajib melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, agar pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat tersebut dapat menerima haknya sesuai polis asuransi

Keterbukaan dalam Komunikasi Internal

Selain melakukan keterbukaan informasi terhadap publik dan pemangku kepentingan lainnya, kami juga berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan dalam komunikasi internal. Hal tersebut juga sebagai upaya dari menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif guna mendukung pencapaian kinerja.

Kami senantiasa menciptakan komunikasi dua arah melalui berbagai media komunikasi, di antaranya ialah Intranet Perusahaan, e-mail blasting, poster, pengumuman melalui pengeras suara internal di setiap ruangan kerja, digital signage dan Group WhatsApp.

Prinsip Dasar

Dalam hubungan dengan pemangku kepentingan, kami mengacu pada prinsip dasar yang mencakup:

Memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis,

tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

Mengevaluasi kebutuhan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak

Mengevaluasi kebutuhan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang memperoleh manfaat;

Mengungkapkan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

Perusahaan bertindak dengan integritas, kompetensi, serta niat yang baik.



Pola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Kami memiliki pola hubungan dengan pemangku kepentingan yakni sebagai berikut:

Hubungan dengan Pemegang Saham

Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku

Hubungan dengan Karyawan

Setiap Kebijakan perusahaan yang terkait dengan karyawan disusun secara transparan dan mengakomodasi kepentingan pegawai dengan memperhatikan kondisi Perusahaan

Perusahaan akan memperhatikan hak karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Hubungan dengan Tertanggung

Strategi perusahaan berorientasi pada kepuasan pelanggan

Perusahaan secara transparan memberikan informasi spesifikasi produk-produk yang disediakan oleh Perusahaan

Perusahaan memperlakukan semua pelanggan dengan standar pelayanan yang baik dengan memanfaatkan secara optimal potensi yang dimiliki Perusahaan.

Perusahaan menerapkan suatu sistem penjaminan kualitas jasa, termasuk penanganan keluhan atas jasa melalui mekanisme yang baku dan transparan.

Perusahaan memelihara hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan para pelanggan.

Hubungan dengan Penyedia Barang dan Jasa

Penyedia barang dan jasa merupakan mitra kerja strategis bagi Perusahaan.

Perusahaan harus menjalin kerjasama yang baik, adil, dan transparan dengan penyedia barang dan jasa guna menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Perusahaan memelihara data dan informasi yang mutakhir mengenai penyedia barang dan jasa.

Perusahaan melakukan evaluasi secara adil dan transparan terhadap penyedia barang dan jasa.

Perusahaan akan memperhatikan hak dan kewajiban penyedia barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hubungan dengan Masyarakat

Perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekelilingnya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan dengan Masyarakat

Perusahaan mengembangkan program - program yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.

Hubungan dengan Pemerintah

Perusahaan wajib untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan senantiasa meningkatkan kinerja perusahaan guna meningkatkan kontribusi pada pembangunan nasional.



Membangun Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

Komunikasi dapat tercapai melalui interaksi timbal balik yang saling mendukung antara kami dengan para pemangku kepentingan. Kami juga membuka komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui berbagai media antara lain surat, telepon, email, sosial media sebagai prosedur untuk menangani keluhan dari para stakeholder khususnya nasabah/ pelanggan.

Selain itu, kami bersama BUMN lainnya sudah tergabung dalam jaringan www.lapor.go.id LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan

berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/ Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.



Menuju Lingkungan yang Lestari







Komitmen kami untuk memberikan kontribusi terhadap pemangku kepentingan dan juga terhadap lingkungan tertuang dalam SK Direksi No. 00067/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/03 / 2018 bahwa komitmen Indonesia Re menjadi jiwa dari seluruh aktivitas kami dalam menjalankan bisnis, meningkatkan efisiensi dan dapat menjadi nilai tambah bagi kami serta tanggung jawab sosial bagi lingkungan.

Dalam kegiatan usaha kami tidak memiliki dampak langsung terhadap lingkungan hidup, karena kegiatan usaha kami adalah bidang keuangan. Namun kami sadari secara tidak langsung terdapat dampak yang dihasilkan dari kegiatan operasional yang kami lakukan sehari-hari.

Dalam kegiatan operasional kami membutuhkan energi listrik, penggunaan kertas dan air. Jika kami menggunakannya dengan tidak bijak, maka secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Terkait dengan upaya di lingkungan internal kami, pendekatan yang kami lakukan adalah dengan menerapkan efisiensi, dan hal itu selalu kami sosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan kami, sehingga menjadi bagian dalam kegiatan operasional kami.

Sedangkan untuk lingkungan di sekitar lingkungan kami, pendekatan yang kami lakukan adalah terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan baik secara langsung oleh kami, maupun bekerja sama dengan pihak ketiga.

Target dan Rencana Kegiatan

Dalam kegiatan operasional kami membutuhkan energi listrik, penggunaan kertas dan air. Jika kami menggunakannya dengan tidak bijak, maka secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Terkait dengan upaya di lingkungan internal kami, pendekatan yang kami lakukan adalah dengan menerapkan efisiensi, dan hal itu selalu kami sosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan kami, sehingga menjadi bagian dalam kegiatan operasional kami.

Sedangkan untuk lingkungan di sekitar lingkungan kami, pendekatan yang kami lakukan adalah terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan baik secara langsung oleh kami, maupun bekerja sama dengan pihak ketiga.

Target dan Rencana Kegiatan

Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam program Pemberdayaan Kampung Tempe :

01

Pembangunan Rumah Produksi Tempe.

02

Pembelian mesin pemecah kedelai agar proses pemecahan kedelai dengan cara manual atau diinjak dapat dihilangkan.

03

Pengadaan rak untuk display produk tempe dan segala olahan tempe serta hasil produksi UMKM dari masyarakat sekitar.

04

Pembuatan cerobong untuk menghindari agar asap proses pembakaran dapat dibuang keluar sehingga menghindari para pengrajin tempe dari penyakit ISPA dan terciptanya lingkungan yang bersih dari polusi yang diakibatkan limbah serta asap hasil pengolahan tempe sehingga tingkat kesehatan para pengrajin tempe dan warga sekitar menjadi lebih baik.

- 05 Pembuatan biomethagreen yang diharapkan mampu mengatasi limbah cair tempe sekaligus menyediakan sumber energi alternatif.
- 06 Pembelian mesin pembuatan tempe untuk produksi dan edukasi wisata pembuatan tempe.
- 07 Program stimulasi dan penyediaan sarana produksi untuk kelompok pengrajin tempe yang sudah eksis sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi.
- 08 Pelatihan dan edukasi untuk para pengrajin tempe terkait masalah pengurusan izin edar makanan dari MUI atau BPOM dan packaging yang baik agar market penjualan tempe tidak hanya di daerah sekitar tetapi dapat lebih diperluas dengan menggunakan pemasaran secara online agar pangsa pasarnya semakin berkembang luas.
- 09 Pelatihan untuk pembuatan tempe premium dengan harga yang tinggi.
- 10 Pembuatan gapura Kampung Tempe sebagai ikon Kampung Tempe yang dapat digunakan sebagai daerah tujuan wisata, baik lokal maupun luar daerah.

Dampak Kuantitatif

Adapun dampak kuantitatif dari program Pemberdayaan Kampung Tempe bagi kami, di antaranya yaitu:

01

Terbentuknya citra positif Indonesia Re yang memiliki tata kelola manajemen Program Kemitraan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan untuk perbaikan yang berkelanjutan, sehingga tercipta relasi yang lebih baik dengan lingkungan sekitar serta Stakeholder secara umum.

02

Strategi branding yang dilakukan di lokasi program dengan logo Indonesia Re akan menguatkan citra positif tersebut.



Program Pemberdayaan Kampung Tempe tersebut menjangkau 21 pasangan suami istri yang terdiri dari 42 individu dari kampung Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah.

Pengaduan Masalah Lingkungan

Kami adalah perusahaan penyedia jasa Reasuransi yang menerapkan sistem business to business (B2B), yaitu menjual produk atau jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain sehingga tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat atau konsumen. Mengingat bisnis yang dijalankan tidak berhubungan langsung dengan lingkungan, kami belum pernah menerima pengaduan untuk masalah lingkungan, baik secara online maupun ke kotak pengaduan, meskipun sarana untuk pengaduan tersebut tersedia di Indonesia Re.



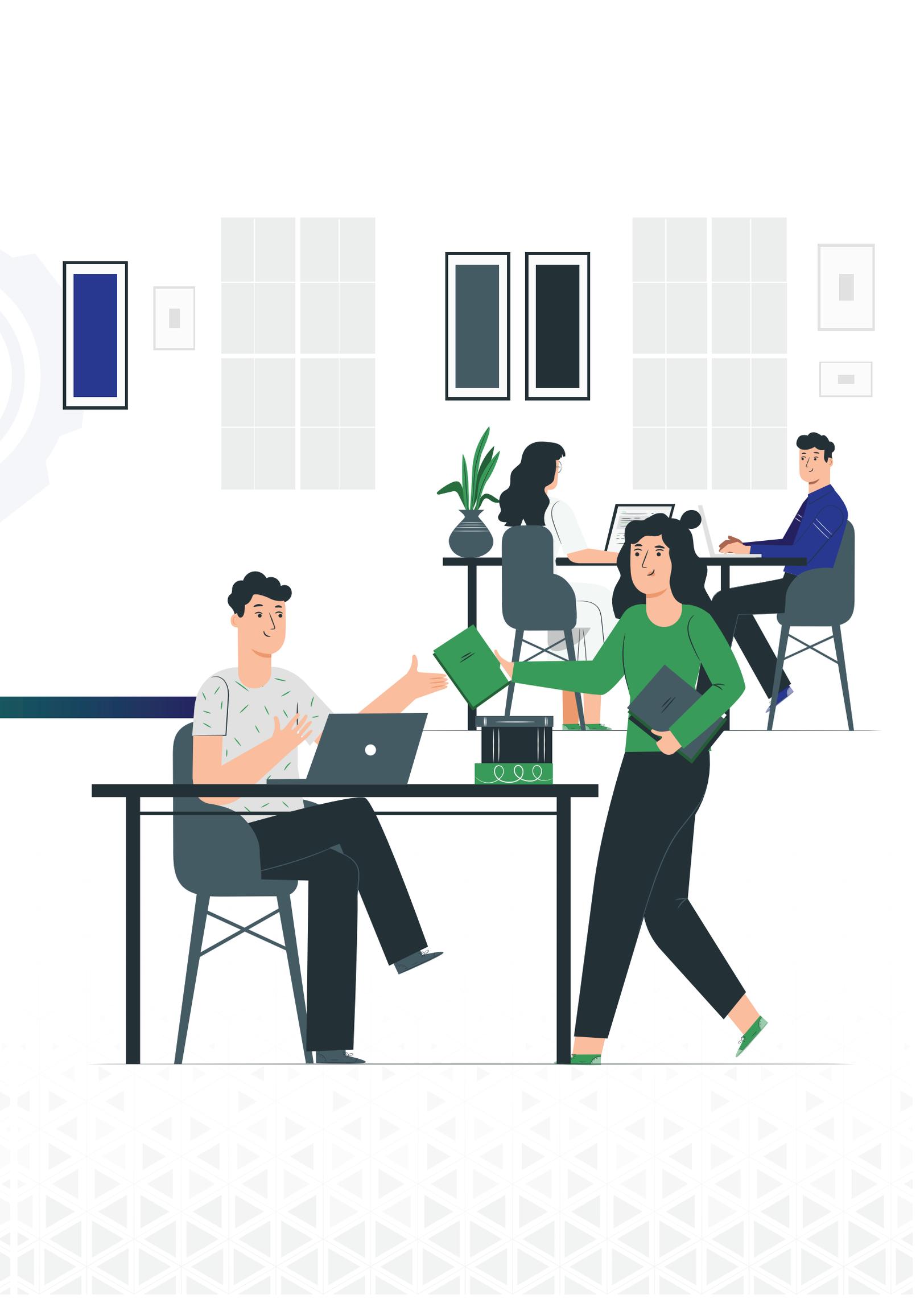
Sertifikasi di Bidang Lingkungan Hidup

Kami belum memiliki sertifikasi yang dibutuhkan dalam bidang lingkungan dan belum merasa perlu memiliki sertifikasi tersebut mengingat kami tidak bergerak dalam bidang tersebut. Seluruh kegiatan CSR bidang lingkungan hidup yang kami lakukan selama tahun 2020 dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni Generasi Muda Cendekia (GMC) Foundation, yang memiliki kompetensi di bidangnya.



Menciptakan Iklim Kerja yang Kondusif





Karyawan adalah aset terpenting yang kami miliki karena mereka adalah penggerak dan pelaksana operasional sehari-hari. Bagi kami semua karyawan adalah unik dan masing-masing mempunyai kekuatan dan kekurangan. Untuk itu, kami sangat memperhatikan kualitas dan kapasitas karyawan sehingga mereka bisa bekerja secara paripurna.

[GRI 103-1]

karyawan merupakan organ yang sangat penting dalam merealisasikan target

usaha serta visi dan misi Perusahaan. Sehingga pengelolaan dan pengembangan SDM senantiasa menjadi salah satu perhatian utama kami, mengacu pada roadmap yang telah kami susun.

kami telah memiliki rencana dan strategi pengelolaan SDM yang dibagi menjadi empat ranah di antaranya Implementasi Talent Management, HC Unggul Indonesia Re Maju, Employee Experience Management, dan Employee Retention Program :

01 Implementasi Talent Management

- New performance management system
- Pemetaan kompetensi karyawan

03 Employee Experience Management

- Kegiatan penunjang (olah raga dan kerohanian)

04 Employee Retention Program

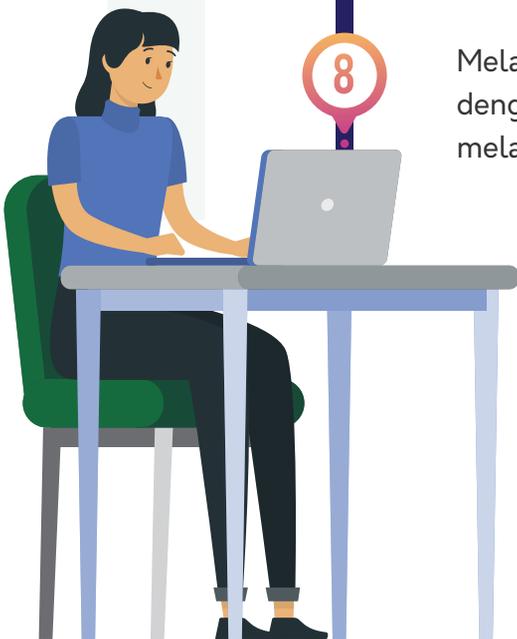
- Pay for performance based
- Introducing new bonus scheme

02 HC Unggul Indonesia Re Maju

- Fast track
- Competency based development
- Pemberian kesempatan pendidikan bagi top talent
- Inisiasi knowledge management

Pencapaian 2020

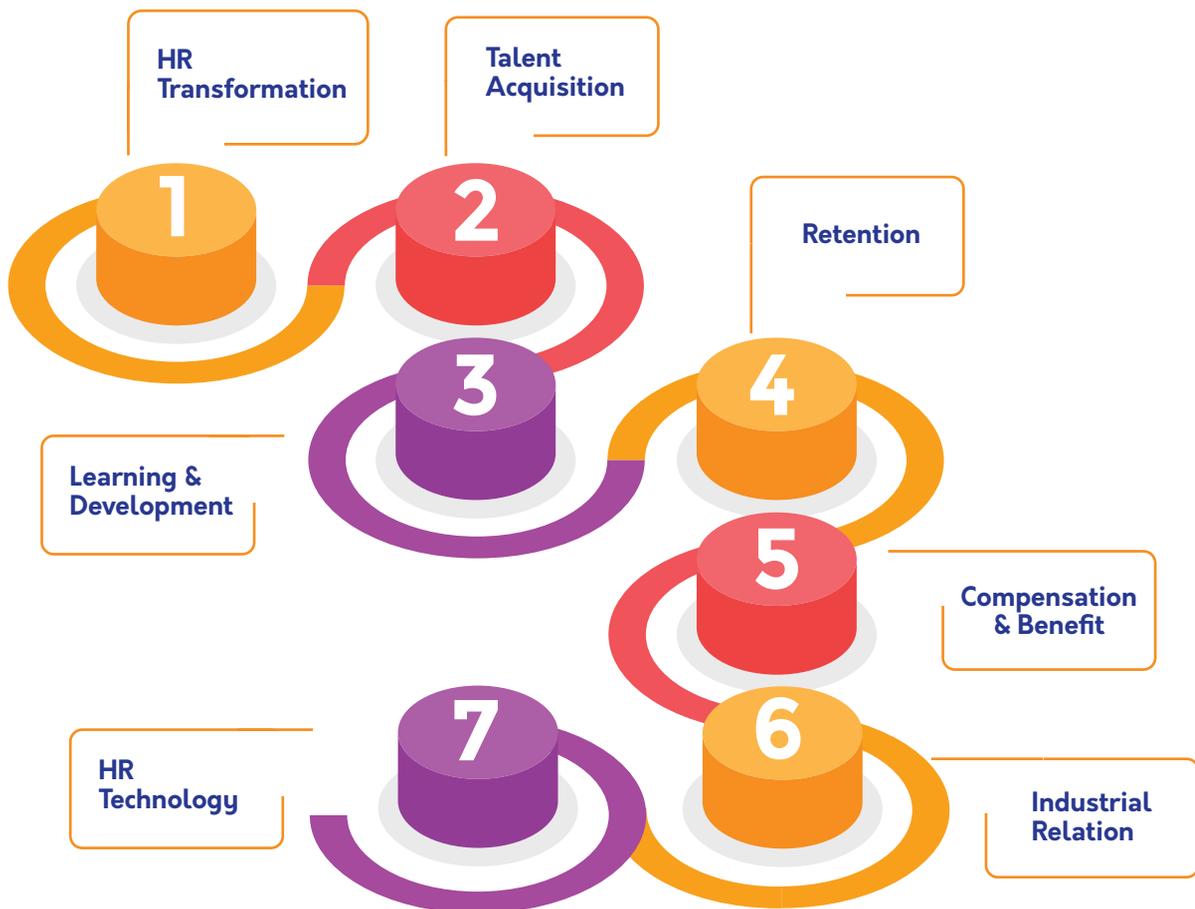
- 1 Implementasi kamus kompetensi ke dalam strategi pengembangan SDM seperti job fitting dan rekrutmen,
- 2 Implementasi talent pool dalam strategi pengembangan SDM,
- 3 Implementasi human capital information system,
- 4 Pengendalian jumlah karyawan tetap,
- 5 Pemenuhan gelar profesi teknik, non teknik dan manajemen
- 6 Penghargaan masa kerja karyawan,
- 7 Implementasi program fast track dan assignment,
- 8 Melakukan penyesuaian operasional jam kerja perusahaan dengan menerapkan sistem kerja WFH dan WFO untuk melakukan adaptasi dalam menghadapi pandemi COVID-19.



Roadmap Pengelolaan 2020

Kami telah merancang roadmap pengelolaan dan pengembangan SDM sebagai langkah mewujudkan visi, misi, serta target pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Roadmap tersebut sebagai panduan dalam penerapan pengelolaan SDM di Indonesia Re secara konsisten dan berkelanjutan.

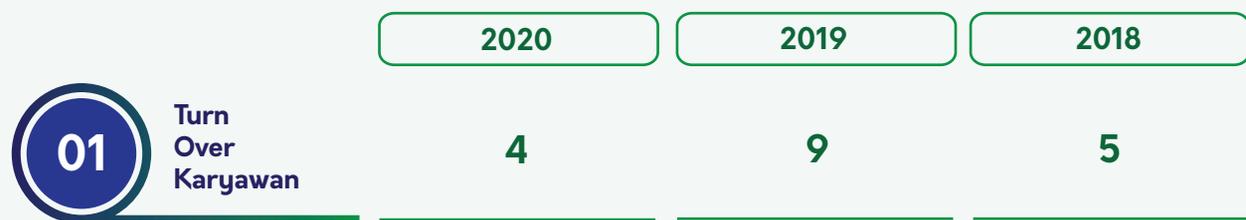
Human Capital Road Map



Untuk mencetak karyawan yang berkualitas kami mulai dari rekrutmen yang kami lakukan untuk menjangkau kandidat terbaik. Rekrutmen kami lakukan secara terbuka, adil, berlaku untuk semua kalangan, tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan pandangan politik. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi karyawan secara adil

melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Tak hanya itu, kami juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kami juga menjamin hak-hak normatif karyawan, seperti memberikan upah dan tunjangan sesuai ketentuan perusahaan, melakukan review yang adil, memperlakukan semua karyawan secara setara dan tidak ada diskriminasi, dan sebagainya.

Selama tahun pelaporan, kami tidak melakukan perekrutan karyawan baru. Tingkat turn over karyawan Indonesia Re adalah sebesar 4% dengan jumlah karyawan yang keluar sebanyak 10 orang. Realisasi tersebut lebih rendah 5% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar 9%. Adapun perkembangan tingkat turn over karyawan dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut: [\[GRI 401-1\]](#)



Keberagaman Badan Tata Kelola

Selaras dengan prinsip GCG, Kami juga memperhatikan keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Keberagaman di dalam komposisi badan tata kelola yang terdiri dari Dewan Komisaris dan yang ditujukan dengan salah satu anggota Dewan Komisaris merupakan perempuan.

Kewenangan untuk mengangkat Komisaris dan Direktur perusahaan merupakan hak

dari Pemegang Saham dalam RUPS dengan mempertimbangkan unsur keberagaman dalam menetapkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, baik dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin serta penerapan kebijakan non diskriminatif. Keberagaman komposisi tersebut juga memperhatikan kebutuhan Perusahaan.

[\[GRI 405-1\]](#)

Tabel Keberagaman Dewan Komisaris

Budi Setyarso



Jenis Kelamin:
Laki-laki



Usia:
63 Tahun pada akhir
Tahun Buku 2020



**Jenjang Pendidikan
& Bidang Studi:**
- S1 Ekonomi
- S2 Manajemen



Pengalaman & Keahlian:

Kepemimpinan organisasi Dunia Usaha

Perasuransian

Kepemimpinan Perusahaan

Manajemen dan Ekonomi

Rainoc



Jenis Kelamin:
Laki-laki



Usia:
51 Tahun pada akhir
Tahun Buku 2020



**Jenjang Pendidikan
& Bidang Studi:**
- S1 Ekonomi



Pengalaman & Keahlian:

Birokrasi dan Pemerintahan

Bidang Ekonomi

Industri Keuangan

Dadang Iskandar



Jenis Kelamin:
Laki-laki



Usia:
57 Tahun pada akhir
Tahun Buku 2020



**Jenjang Pendidikan
& Bidang Studi:**
-S1 Kesejahteraan Sosial
-S2 Akuntansi



Pengalaman & Keahlian:

Birokrasi dan Pemerintahan

Bidang Ekonomi

Industri Keuangan

Dwi Pudjiastuti Handyaani



- Jenis Kelamin:**
Perempuan
- Usia:**
54 Tahun pada akhir Tahun Buku 2020
- Jenjang Pendidikan & Bidang Studi:**
 - S1 Ekonomi
 - S2 Ekonomi Pembangunan



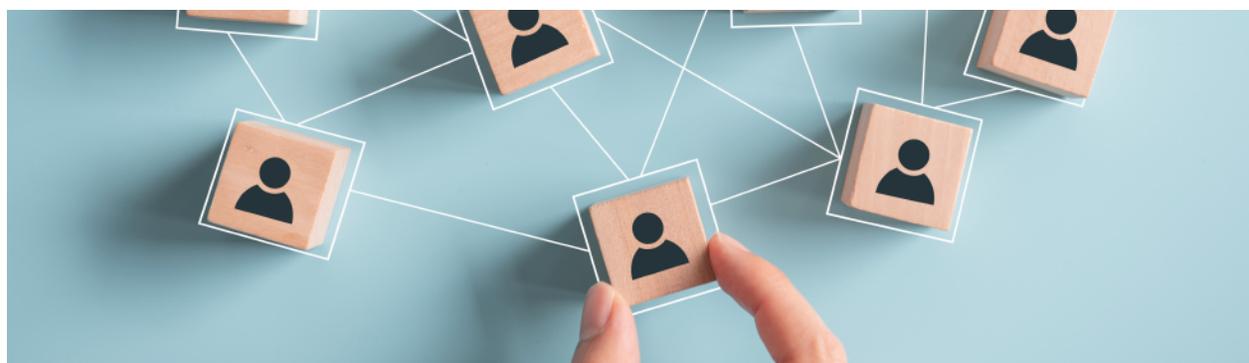
Pengalaman & Keahlian:

Sistem Penganggaran Pemerintah

Birokrasi

Bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang Ekonomi



Tabel Keberagaman Direksi

Kocu Andre Hutagalung



- Jenis Kelamin:**
Laki-Laki
- Usia:**
49 Tahun pada akhir Tahun Buku 2020
- Jenjang Pendidikan & Bidang Studi:**
 - S1 Fisika
 - S2 Material Science
 - Bachelor Degree ACII/CIP
 - Diploma Degree ACII/CIP



Pengalaman & Keahlian:

Kepemimpinan dan Manajemen Perusahaan

Bidang Teknik

Pengelolaan Korporasi

Perasuransian

Putri Eka Sukmawati



Jenis Kelamin:
Perempuan



Usia:
49 Tahun pada akhir
Tahun Buku 2020



**Jenjang Pendidikan
& Bidang Studi:**
-S1 Hukum
-S2 International
Banking and Finance
Program



Pengalaman & Keahlian:

Bidang Hukum

Bidang Keuangan dan Perbankan

Manajemen Perusahaan

RR.Dewi Ariyani



Jenis Kelamin:
Perempuan



Usia:
51 Tahun pada akhir
Tahun Buku 2020



**Jenjang Pendidikan
& Bidang Studi:**
-S1 Akuntansi
-S2 Akuntansi



Pengalaman & Keahlian:

Birokrasi dan Pemerintahan

Akuntansi

Manajemen Perusahaan

Erickson Mangunsong



Jenis Kelamin:
Perempuan



Usia:
48 Tahun pada akhir
Tahun Buku 2020



**Jenjang Pendidikan
& Bidang Studi:**
-S1 Ilmu Komputer
-Post Graduate Diploma
Asuransi
-S2 Sains



Pengalaman & Keahlian:

Bidang Teknik

Perasuransian

Jumlah Karyawan Indonesia Re berdasarkan Jenis Kelamin

	2020	2019	2018
 Laki-Laki	135	139	149
 Perempuan	84	87	83
Total	219	226	232

Jumlah Karyawan Baru berdasarkan Usia

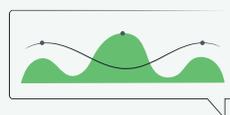
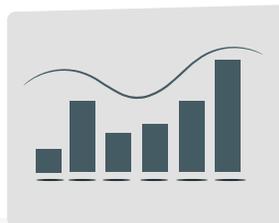
	2020	2019	2018
 18 – 25 Tahun	23	21	11
 26 – 35 Tahun	80	86	93
 36 – 45 Tahun	57	57	58
 46 – 55 Tahun	53	55	63
 >55 Tahun	6	7	7
Total	219	226	232

Jumlah Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian

	2020	2019	2018
 Karyawan Tetap	23	21	11
 Karyawan Kontrak	80	86	93
Total	219	226	232

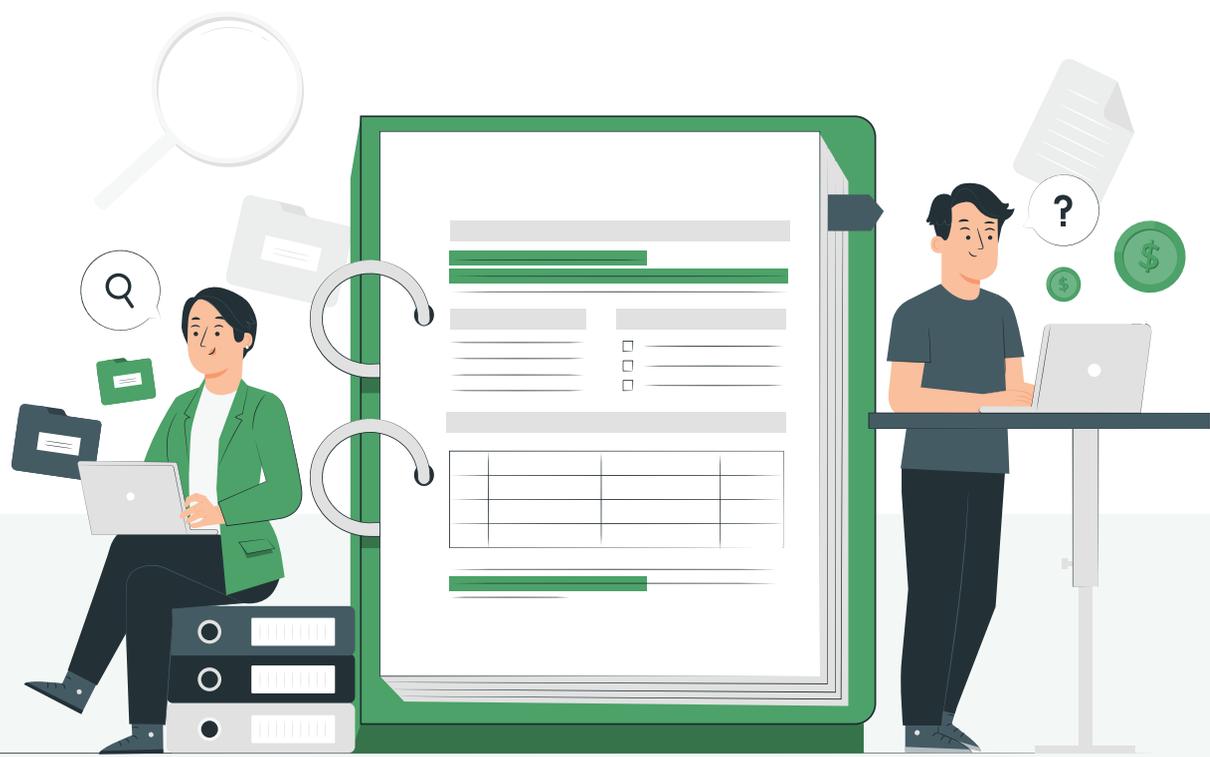
Jumlah Karyawan berdasarkan Gender

	2020	2019	2018
 Laki-Laki	135	139	149
 Perempuan	84	87	83
Total	219	226	232



Jumlah Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

	2020	2019	2018
 S2	48	48	43
 S1	144	150	160
 D3	15	15	13
 SMA/ Sederajat	12	13	16
Total	219	226	232



Jumlah Karyawan berdasarkan level Jabatan

	2020	2019	2018
 Kepala Divisi	13	14	12
 Kepala Departemen	31	29	30
 Kepala Departemen Fungsional	2	1	2
 Kepala Unit	20	24	37
 Kepala Unit Fungsional	53	48	14
 Staf	54	51	110
 Fungsional Staf	18	26	0
 Kontrak	28	33	27
Total	219	226	232

Jumlah Karyawan Baru berdasarkan Usia

	2020	2019	2018
 18 – 25 Tahun	23	21	11
 26 – 35 Tahun	80	86	93
 36 – 45 Tahun	57	57	58
 46 – 55 Tahun	53	55	63
 >55 Tahun	6	7	7
Total	219	226	232

Kesejahteraan Karyawan

Kami selalu berupaya untuk menjamin kesejahteraan karyawan sehingga karyawan akan memberikan dedikasinya bagi perusahaan. Untuk itu Perusahaan menetapkan upah dengan ketentuan yang berlaku, yakni berada di atas upah minimum regional sesuai dengan lokasi Perusahaan berada. Selain itu, kami juga memberikan fasilitas kepada seluruh karyawan tanpa pengecualian, di antaranya:

Remunerasi yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku.

Memberikan hak cuti bagi karyawan.

Mengikutsertakan Karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberian tunjangan-tunjangan diantaranya tunjangan hari raya, tunjangan rumah, dll.

Bantuan dana pendidikan.

Kesempatan kerja yang adil dan kesetaraan gender bagi seluruh karyawan.



Penghargaan Masa Kerja

Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada karyawan tetap yang telah memberikan jasa dan pengabdianya terhadap perusahaan, maka Direksi memandang perlu untuk memberikan penghargaan masa kerja kepada karyawan yang tercantum pada SK No.00894/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/12/2017 tertanggal 18 Desember 2017.

Pemberian penghargaan masa kerja tersebut diberikan pada saat acara peringatan hari ulang tahun Indonesia Re setiap tahunnya atau waktu lain yang dianggap lebih sesuai atau tepat. Penghargaan masa kerja kami berikan kepada karyawan tetap dengan ketentuan tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penghargaan	Ketentuan Masa Kerja	Nilai Penghargaan	
	Uang	10 Tahun	50% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 1,25 juta
	15 Tahun	75% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 1,5 juta	
	20 Tahun	100% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 1,75 juta	
	25 Tahun	125% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 2 juta	
	30 Tahun	150% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 2,25 juta	

	Cincin Emas	25 Tahun	15 Gram
	<p>Telah memasuki batas usia pension normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</p>		

Hubungan Industrial

Kami memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat melalui serikat pekerja yang mengacu pada prinsip dasar hubungan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut ditujukan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara karyawan dan manajemen.

Hubungan industrial tersebut diwujudkan melalui serikat pekerja. Serikat Pekerja Indonesia Re berdiri berdasarkan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja No. 704/SP/JP/ III/2017 tanggal 13 Maret 2017. Serikat Pekerja Indonesia Re mengatur hak dan tanggung jawab dan persetujuan dari Direksi. Pada tahun pelaporan 100 % karyawan yang telah bergabung kedalam serikat pekerja Indonesia Re. [\[GRI 102-41\]](#)

Dengan terjalin baiknya komunikasi antara kami dan Karyawan maka diharapkan akan terjalin sinergi kinerja yang optimal sehingga akan memudahkan dalam pencapaian tujuan bersama. Pada tahun 2020, tidak tercatat adanya pelanggaran dalam hak kebebasan berserikat pada Perusahaan.



The background features a light blue grid pattern with a repeating geometric motif of triangles. In the upper right, there are two large, light blue gear icons. On the left side, a portion of a grey office chair is visible. A large green circle with a dark green border is positioned on the left, containing the number '09'. To the right of this circle, the title 'Pengembangan Kompetensi Karyawan' is written in a dark blue, bold font. A dark blue horizontal line extends from the bottom of the green circle across the page.

09

Pengembangan Kompetensi Karyawan



Salah satu pemangku kepentingan internal kami yang berperan sangat besar adalah karyawan. Oleh karena itu kami membutuhkan karyawan yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. Untuk menciptakan karyawan yang berkualitas dan berkompoten, Kami secara konsisten mengalokasikan dana untuk membiayai berbagai program pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2020, dana yang kami keluarkan untuk pendidikan dan pelatihan karyawan tercatat sebesar Rp 2,29 miliar, atau 38,9% dari alokasi yang sebesar Rp5,8 miliar. Realisasi biaya tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, yang sebesar Rp5,7 miliar. Hal tersebut dikarenakan pandemi yang masih melanda, sehingga pelatihan dan pengembangan yang dapat karyawan kami ikuti hanyalah dengan sistem online.^[GRI 103-1]

Setiap karyawan Indonesia Re berhak untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan softskill maupun hardskill yang terkait dengan fungsi pekerjaan setiap individu karyawan dalam rangka peningkatan efektivitas dalam bekerja. Setiap karyawan juga berkewajiban dalam mengelola dan memperkaya kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Kami memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan. Selain karyawan yang berkualitas, kami juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan Indonesia Re. Pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh karyawan kami dapat dilihat pada lampiran Laporan Keberlanjutan 2020 halaman xx.

Berikut adalah Rerata Pelatihan yang diikuti oleh seluruh karyawan kami :

Rerata Jam Pelatihan per karyawan berdasarkan Gender [GRI 404-1]

Uraian	2020	
		
Jumlah Jam Pelatihan	3852	1950
Jumlah Peserta	671	341
Rerata Jam Pelatihan per karyawan	5,74	5,71

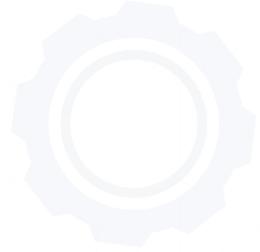
Jumlah Peserta Pelatihan berdasarkan Gender dan Jabatan [GRI 404-1]

Uraian	2020	
	Jumlah Pelatihan	Jam Pelatihan
Division Head	83	411
Department Head	192	1201
Fungsional Setingkat Department Head	11	73
Unit Head	112	756
Fungsional Setingkat Unit Head	289	1722
Staff	223	1072
Fungsional Staff	96	544
Total Pelatihan	1006	5779



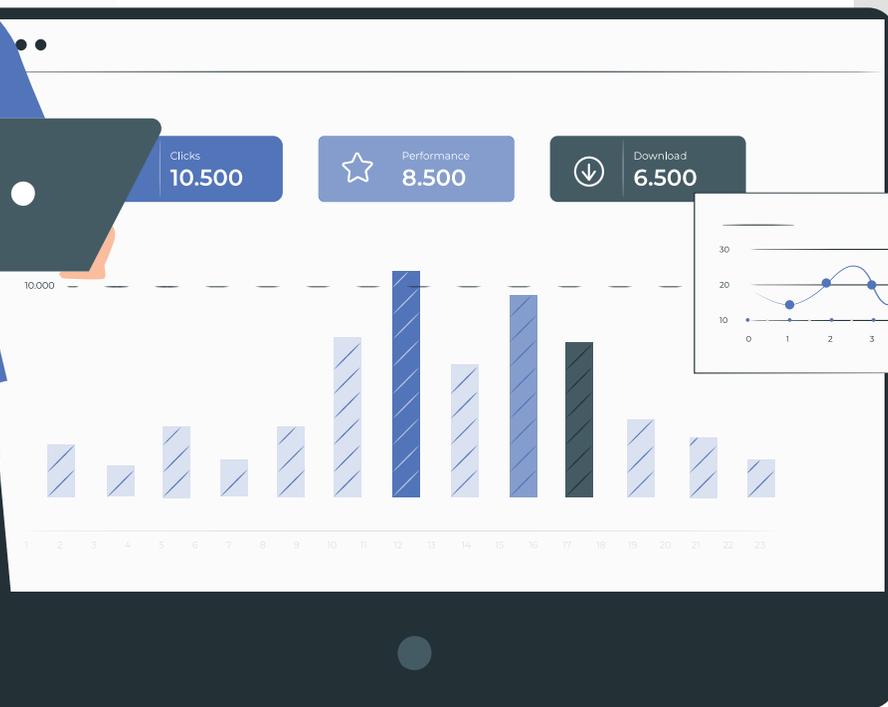
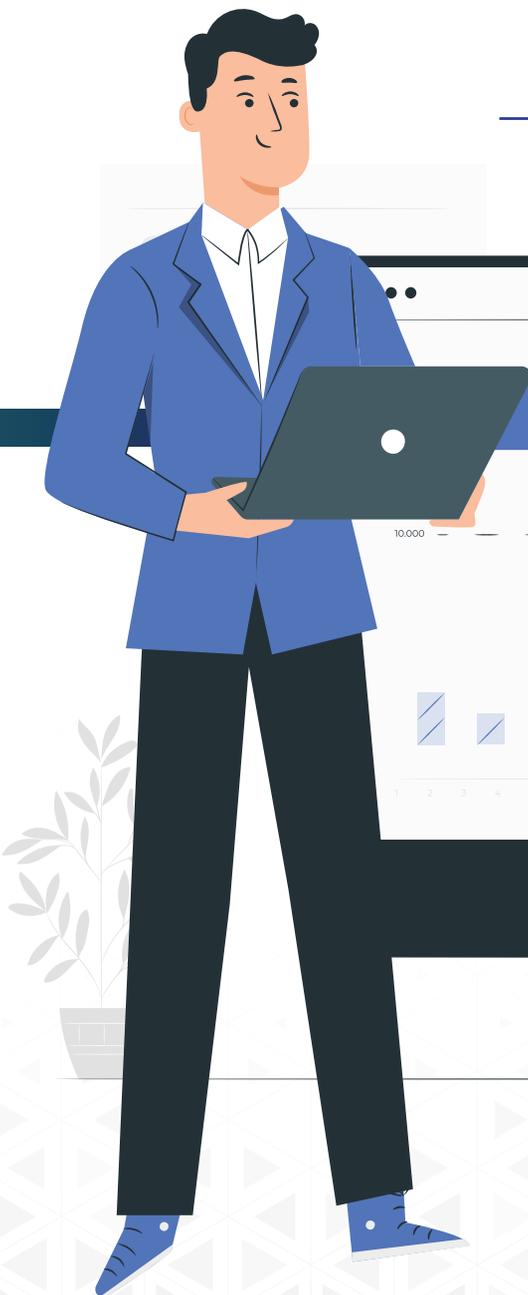
08

Tentang Laporan





kami menerbitkan laporan keberlanjutan untuk memastikan para pemangku kepentingan mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap kinerja kami dalam mengelola dampak operasional di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.



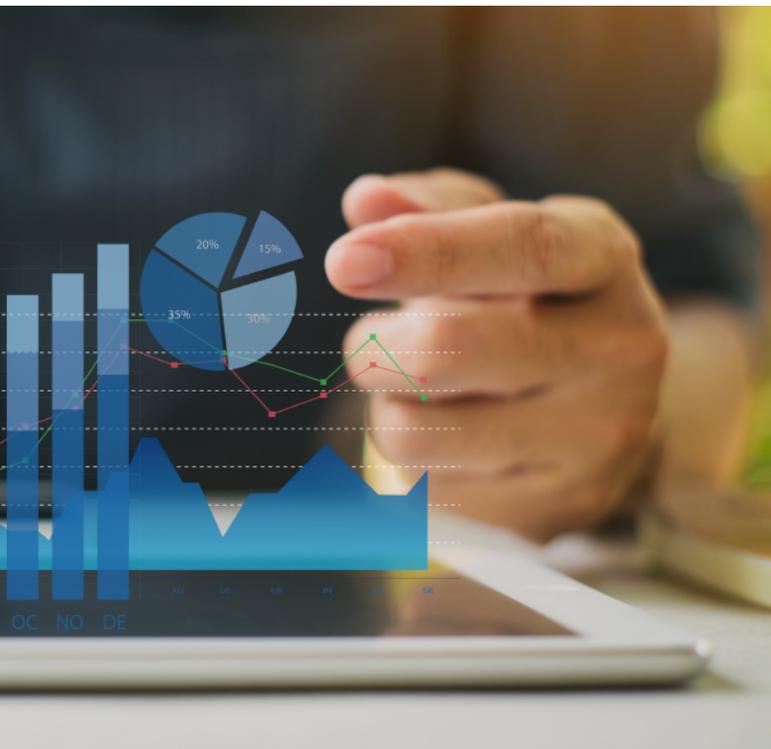
Dalam rangka mendukung komitmen Indonesia Re terhadap pengembangan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, secara konsisten kami menerbitkan Laporan Keberlanjutan. Laporan keberlanjutan ini merupakan laporan ke-tiga yang dipublikasikan oleh kami, dan terus berkesinambungan dengan laporan-laporan berikutnya. Dalam konteks pelibatan pemangku kepentingan, laporan keberlanjutan ini diharapkan dapat mendukung perusahaan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik demi sinergi bisnis yang berkelanjutan.

kami berkomitmen menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahun agar para pemangku kepentingan dapat selangkah lebih dekat kepada kami. Laporan Keberlanjutan kami publikasikan melalui portal web resmi perusahaan. Laporan keberlanjutan Indonesia Re mencakup data dan informasi kami berdasarkan ruang lingkup untuk masa pelaporan 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, yang memuat informasi mengenai komitmen, kebijakan, strategi, dan kinerja kami dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan dilengkapi perbandingan kinerja satu atau dua tahun sebelumnya. Dalam pelaporan ini hanya membahas kinerja Indonesia Re saja, tidak terdapat pernyataan kembali (restatement) yang bersifat memperbaiki laporan sebelumnya dan tidak ada perubahan signifikan dibandingkan laporan sebelumnya. [GRI 102-45] [GRI 102-48] [GRI 102-49] [GRI 102-50] [GRI 102-51] [GRI 102-52]



Kami menerbitkan Laporan ini dalam satu bahasa, yakni Bahasa Indonesia, dengan menggunakan nominasi Rupiah untuk data finansial. Data finansial yang diungkap dalam laporan ini adalah data yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk keperluan Laporan Tahunan Perusahaan. Data kuantitatif dalam Laporan ini disajikan dengan menggunakan prinsip daya banding (comparability), minimal dalam dua tahun berturut-turut. Dengan demikian, pengguna Laporan dapat melakukan analisis tren ihwal kinerja Perusahaan.

Laporan ini disusun berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta Standard GRI (GRI Standards), yang secara resmi berlaku per 1 Juli 2018.



Standar GRI adalah rujukan yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB) – lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Sesuai dengan pilihan yang disediakan dalam Standar GRI, yakni Pilihan Inti dan Pilihan Komprehensif, “Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan Inti”. [GRI 102-54]

Agar memudahkan para pemangku kepentingan menemukan disclosure standart yang diaplikasikan, Kami menyajikan disclosure Standar GRI dengan huruf berwarna khusus pada setiap halaman yang relevan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam menemukan informasi terkait untuk setiap pengungkapan. Data lengkap kecocokan

informasi Perusahaan dengan POJK No.51/POJK.03/2017 maupun Indeks Standard GRI disajikan di bagian belakang laporan ini, dimulai pada halaman XX.

[GRI 102-54][GRI 102-55]

GRI merekomendasikan penggunaan external assurance oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan kehandalan informasi yang disampaikan dalam laporan ini. Kami belum melakukan proses verifikasi atau penjaminan (assurance) oleh pihak eksternal atas Laporan ini, karena hal itu bukanlah persyaratan agar dapat “sesuai” dengan Pedoman. Atas pertimbangan tertentu dari manajemen, Kami belum melakukan penjaminan dari pihak ketiga yang independen. Namun demikian, kami menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual. [GRI 102-56]

Kami berharap laporan ini bisa menjadi sumber informasi bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui ihwal kinerja keberlanjutan yang dilakukan selama tahun 2020. Untuk terwujudnya komunikasi dua arah, kami menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir laporan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

Tahap dan Prinsip Pembuatan Laporan

Laporan Keberlanjutan Indonesia Re merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Indonesia Re. Dalam membuat Laporan ini, kami mempertimbangkan prinsip keterlibatan pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan untuk menjadi acuan dalam menentukan isi Laporan Keberlanjutan. Kami juga menjaga Kualitas Laporan dengan mempertimbangkan Keseimbangan, Komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan dalam penyampaian batasan topik material. ^[GRI 102-46]

Prinsip-Prinsip Penentuan Kualitas Laporan

Dalam menyusun Laporan ini, kami berpatokan pada 6 (enam) prinsip kualitas yang direkomendasikan oleh GRI, yaitu:



Keseimbangan

Laporan mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja Perusahaan.



Komparabilitas / Daya Banding

Laporan berisi kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial pada tahun pelaporan, beserta tahun-tahun sebelumnya agar pemangku kepentingan dapat membandingkan kinerja yang ada.



Akurasi

Laporan disampaikan secara akurat dan terperinci sehingga pemangku kepentingan bisa menilai kinerja yang ada.



Ketepatan Waktu

Laporan disusun secara teratur sesuai jadwal yang ditetapkan Perusahaan.



Kejelasan

Laporan memuat kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial dengan pemaparan informasi yang jelas dan gampang



Keandalan

Laporan berisi kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial yang kebenarannya dapat diuji.

Proses Penetapan Isi Laporan [GRI 102-46]

Pada laporan ini, kami mengidentifikasi topik-topik material yang berdampak terhadap keberlanjutan bisnis kami dan yang penting bagi para pemangku kepentingan kami. Daftar topik material dan batasannya tidak mengalami perubahan dibandingkan laporan sebelumnya.

Topik-topik material yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan ini dipilih berdasarkan prinsip-prinsip penetapan isi laporan dari Standar GRI dengan mempertimbangkan:

01

Konteks keberlanjutan

Dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, kami memperhatikan aspek-aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dari bisnis kami. Melalui laporan ini, kami menyajikan kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan konsep keberlanjutan secara luas.

02

Keterlibatan pemangku kepentingan

Kami mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh operasional bisnis kami serta menanggapi topik dan isu-isu yang relevan dan menjadi perhatian mereka.

dalam kaitannya dengan konsep keberlanjutan secara luas.

03

Materialitas

Kami fokus pada topik-topik relevan dan signifikan bagi perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, di mana topik-topik tersebut juga berpengaruh pada keputusan dan penilaian dari para pemangku kepentingan kami.

04

Kelengkapan

Setiap topik dijabarkan secara menyeluruh agar para pemangku kepentingan kami dapat menilai kinerja perusahaan secara utuh dan objektif. Kami juga memastikan bahwa pengumpulan data bersifat lengkap dan menyeluruh untuk menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya.

Proses penetapan topik material dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan dan mempertimbangkan konteks keberlanjutan melalui beberapa tahapan berikut:

Tahap ke-1 : Kami Melakukan identifikasi terhadap topik berdasarkan konteks keberlanjutan dan topik penting yang relevan dengan karakteristik bisnis kami,

berdasarkan prinsip stakeholders inclusiveness. Setiap topik material ditentukan dampaknya terhadap pemangku kepentingan dan juga batasan ruang lingkungannya. Proses identifikasi ini dilakukan melalui diskusi internal.

Tahap ke-2 : Proses penentuan prioritas atas topik-topik keberlanjutan yang akan dilaporkan dilakukan dengan diskusi internal serta membuat prioritas atas aspek-aspek keberlanjutan.

Tahap-3: Pada tahap ini, kami melakukan analisis atas topik-topik material sesuai dengan topik spesifik dari Standar GRI yang akan disampaikan bersamaan dengan pendekatan manajemen di laporan ini.

Tahap-4: Kami menerima dan menganalisis setiap umpan balik dari laporan sebelumnya untuk meningkatkan kualitas laporan kali ini.



Topik Material

Laporan keberlanjutan ini disusun sebagai wujud komitmen kami dalam menegakkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keseimbangan pembangunan. Informasi dalam pelaporan ini merupakan pelaksanaan dan dampak kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial Perusahaan selama tahun 2020. Dengan demikian, tidak ada

perubahan batasan pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Batasan topik material menjelaskan dampak pengaruh setiap topik material terhadap pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Penetapan material dalam laporan ini

disusun berdasarkan survei dan Focus Group Discussion (FGD) pemangku kepentingan internal. Penetapan isi laporan didasarkan pada prinsip stakeholders inclusiveness (pelibatan pemangku kepentingan), materiality (materialitas), sustainability context (konteks keberlanjutan) dan completeness (kelengkapan). Ke-empat prinsip ini sesuai dengan pedoman penulisan laporan keberlanjutan Standar GRI.

Topik material dalam Laporan ini, seperti disebutkan dalam Standar GRI, adalah

topik-topik yang telah prioritaskan organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Dengan pertimbangan bahwa topik material Laporan sebelumnya masih relevan dengan perkembangan usaha kami, namun ada perubahan dalam Laporan berkaitan dengan Topik Material dan Batasan (Boundary) pada Laporan ini.

Didalam laporan tertuang penjelasan mengenai dampak pada setiap topik material. Tabel berikut adalah merupakan daftar topik material berdasarkan hasil diskusi internal.

Batasan Topik Material ^{[GRI 103-1][GRI 102-42][GRI 102-43][102-44][GRI 102-46][GRI 102-47]}

	Topik Material	Mengapa Topik ini Material?	Nomor	Boundary			
				Indonesia Re	Mitra Kerja	Pemerintah	Masyarakat
01	Kinerja Keuangan	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	201 - 1				
02	Dampak ekonomi tidak langsung	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	203 - 1, 203-2				
03	Anti Korupsi	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	205 - 1				

	Topik Material	Mengapa Topik ini Material?	Nomor	Boundary			
				Indonesia Re	Mitra Kerja	Pemerintah	Masyarakat
04	Ke-pegawaian	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	401 - 1	✓		✓	
05	Pelatihan & Pendidikan	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	404 - 1	✓	✓	✓	
06	Ke- anekaragaman dan kesetaraan	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	405 - 1	✓		✓	

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Kami percaya bahwa keberlanjutan perusahaan dapat tercipta melalui hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh operasional kami dalam berbagai hal. Pengelolaan dan pelibatan pemangku kepentingan merupakan upaya kami untuk memahami harapan para pemangku kepentingan dan memastikan pelibatan dan inisiatif yang kami lakukan memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi para pemangku kepentingan dan perusahaan.

Kami membagi kelompok pemangku kepentingan dengan memperhatikan

pengaruh mereka terhadap perusahaan dan begitu pula sebaliknya pengaruh perusahaan terhadap mereka. Bagi pemangku kepentingan, proses pelibatan pemangku kepentingan akan dimaknai sebagai upaya kami untuk memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan. Sedangkan bagi Indonesia Re, interaksi dengan pemangku kepentingan akan menumbuhkan pemahaman yang memadai dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, dengan cara yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar pemilihan pemangku kepentingan berdasarkan hasil diskusi internal yang dihadiri oleh Tim Penyusunan Laporan Keberlanjutan Indonesia Re dari berbagai bagian di Kantor Pusat melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), diskusi ini dilakukan untuk pengidentifikasian topik material untuk Pelaporan Keberlanjutan. Kami mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan interaksi yang sudah terjalin. [GRI 102-42]

Berbagai forum komunikasi formal dan informal terus dijalin agar visi dan misi Perusahaan dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan mencapai sasaran yang tepat. Berdasarkan forum komunikasi tersebut, Kami telah mengidentifikasi dan menentukan pemangku kepentingan, metode pelibatan, frekuensi pelibatan dan topik/harapan pemangku kepentingan dalam pelibatan pemangku kepentingan sebagai berikut:

[GRI 102-40][GRI 102-42][GRI 102-43][GRI 102-44]

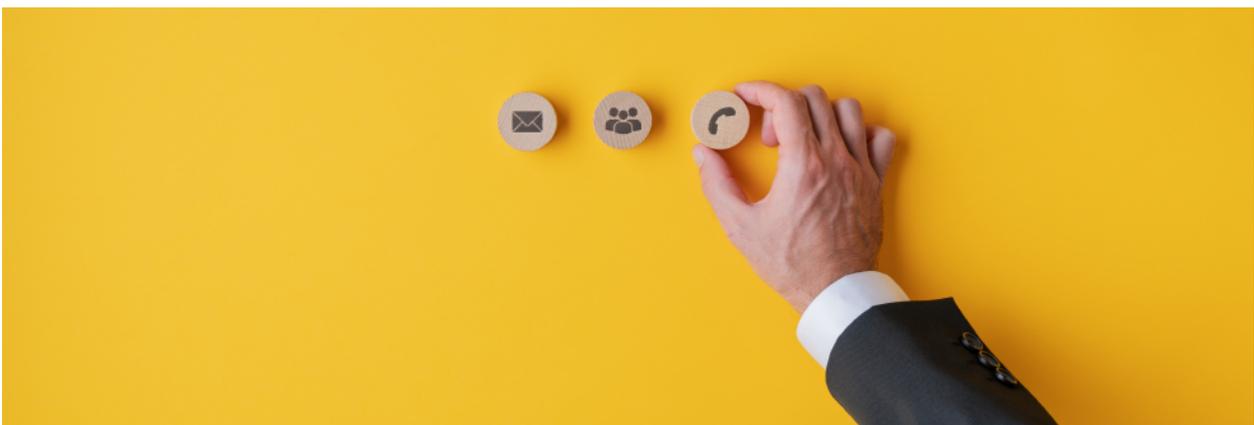
Tabel Pelibatan Pemangku Kepentingan

[GRI 102-40][GRI 102-42][GRI 102-43][GRI 102-44]

Pemangku Kepentingan	Metode Pelibatan	Frekuensi	Topik Utama yang Diajukan	Harapan Pemangku Kepentingan
Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> Website Contact Center Kunjungan Langsung Sosialisasi Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan 	Setiap Saat	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan Komersial Kualitas Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Memperoleh Informasi Tentang Produk Mendapatkan layanan dan mutu layanan yang memuaskan Memberikan perlindungan kepada pelanggan

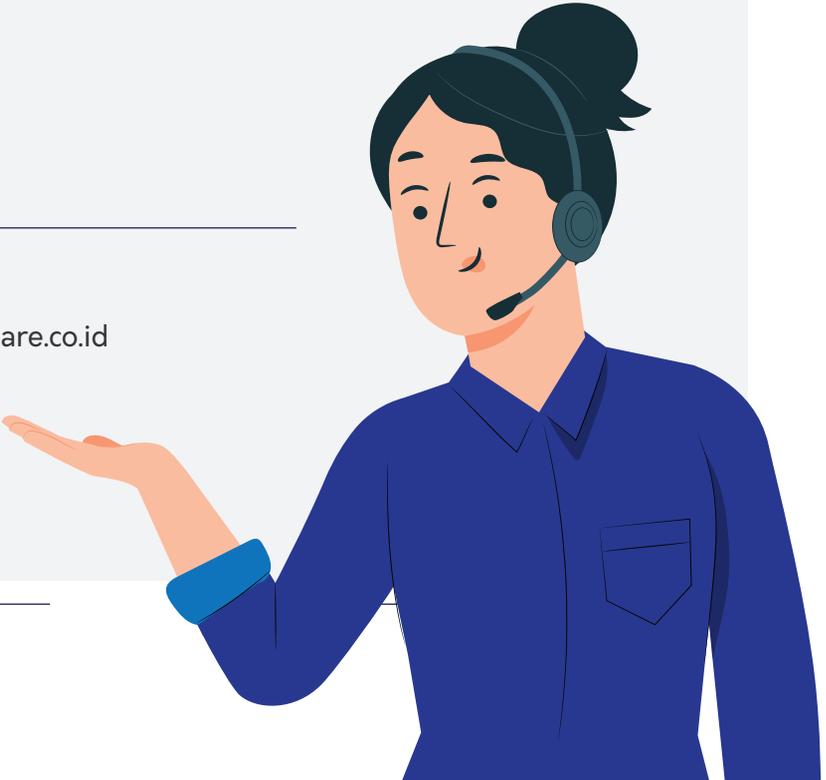
Pemangku Kepentingan	Metode Pelibatan	Frekuensi	Topik Utama yang Diajukan	Harapan Pemangku Kepentingan
Pemegang Saham Pemerintah	RUPS	RUPS Tahunan dalam satu tahun. RUPS luar biasa saat di perlukan	Pembahasan anggaran/ laporan Penanggungjawaban keuangan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris	Perusahaan memiliki kinerja yang unggul dan keberlanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi seluruh pemangku kepentingan
Karyawan	Serikat pekerja Pertemuan rutin	Saat di perlukan	Ketenagakerjaan/ kesejahteraan	Mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, imbalan kerja yang memadai dan memberikan kesempatan untuk berkembang
Pemerintah dan Pembuat Kebijakan	Dengar pendapat DPR Pelaporan yang teratur kepada regulator dan pemerintah	Saat di perlukan	Kontribusi terhadap Negara Kepatuhan terhadap Undang – undang yang berlaku	Perusahaan dapat mencapai rencana kerja yang sudah ditentukan
Mitra Kerja	Kontrak kerja	Saat di perlukan	Hubungan komersial	Proses pengadaan yang objektif

Pemangku Kepentingan	Metode Pelibatan	Frekuensi	Topik Utama yang Diajukan	Harapan Pemangku Kepentingan
	Mitra Investasi Perusahaan Reasuransi lain Perbankan Asosiasi			Memperoleh kerjasama yang saling menguntungkan
Media	Press Realese Media Visit Press Gathering Press conference	Saat di perlukan	Pelaksanaan Program	Narasumber berita yang terpercaya Pemberitaan yang akurat



Akses Informasi atas Laporan Keberlanjutan

Laporan ini ditujukan kepada seluruh Pemangku Kepentingan sebagai salah satu landasan melakukan penilaian atas kinerja kami. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki isi dan meningkatkan kualitas Laporan Keberlanjutan kami. Oleh karenanya, kami akan sangat berterima kasih jika pembaca dan pemangku kepentingan memberikan masukan atau saran untuk memperbaiki Laporan Keberlanjutan ini. Untuk permintaan, pertanyaan, masukan, dan komentar atas laporan ini, silakan menghubungi:



 **PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)** ^[GRI 102-3]^[GRI 102-53]
Jl. Salemba Raya No.30,
Jakarta Pusat 10430,
Indonesia

 **Telepon**
62-21 3920101

 **Faksimili**
62-21 3143828

 **Email:**
cosecretary@indonesiare.co.id

Lampiran 1

Pelatihan Tahun 2020

Topik Pelatihan	Jumlah Peserta	Jam Pelatihan	Rerata Jam Pelatihan/Pekerja
“Embracing Uncertainty” di Industri Asuransi	9	36	4
AAUI ReConnect 2020 - An International Virtual Gathering	6	24	4
Bedah Polls CPU - Comprehensive Project Insurance dan Aplikasinya	2	6	3
BNI-AM Market Outlook 2020	2	40	20
CEO TALKS #2 - Moro W. Budhi	187	374	2
Chief Actuary Sharing Session - IFRS 17	1	8	8
Climate Change - Driver of Market Developments and Business Opportunities	1	5	5
Comet Module AP2	2	4	2
Comprehensive Assessment of Experience General Insurance (ANZIIF)	3	54	18
COVID-19 Hearing Session with dr. Erlina Burhan	188	564	3
Dasar-Dasar Investasi dan Pasar Modal	2	6	3
Enhancing Your Personal Effectiveness	2	8	4

Topik Pelatihan	Jumlah Peserta	Jam Pelatihan	Rerata Jam Pelatihan/Pekerja
Gen Re - COMET Module A1b	1	8	8
Graphic Design Ultimate (Adobe Ps. Ai. Id. An)	1	24	24
GRC Summit Seminar 2020	1	4	4
GRCP Batch IV	2	40	20
Half-Day Motivational Seminar 2020	175	700	4
Inhouse Online Training "ERM Fundamentals - Based on ISO 31000:2018"	14	126	9
Inhouse Online Training Creative Slide Design	10	120	12
Inhouse Online Training Rational Problem Solving	28	504	18
Inhouse Training Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	10	120	12
Inhouse Training CRMO 2020	28	504	18
Inhouse Training Effective Supervisory Management	20	320	16
Inhouse Workshop Persiapan ISO 20000 & 27001	15	540	36
Internal Audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016	21	252	12

Topik Pelatihan	Jumlah Peserta	Jam Pelatihan	Rerata Jam Pelatihan/Pekerja
Internalisasi AKHLAK & Half-Day Motivational Seminar 2020	6	96	16
Introduction to P&I Insurance - The International Group (IG) P&I Mutual Club V Fixed Premium Cargo Liability, Collision Liability, Crew Liability, Wreck Removal and Pollution Liability	38	114	3
IT Governance, Risk Management, Assurance and Cybersecurity Summit (GRACS) 2020	188	1128	6
Mengelola Risiko Akseptasi atas Risiko Konstruksi dan Highrise Building	1	3	3
Mengelola Risiko Akseptasi atas Risiko Konstruksi dan Operasional Jalan	1	3	3
Mengelola Risiko Akseptasi atas Risiko Pabrik Tekstil	2	6	3
Mengelola Risiko Akseptasi atas Risiko PLTU Batubara	2	6	3
Online Executive Coaching Session	14	56	4
Opening Program Scholarship Digital Mindset	2	4	2
Pelatihan Awareness dan Interpretasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001	26	156	6
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA Online)	1	188	188

Topik Pelatihan	Jumlah Peserta	Jam Pelatihan	Rerata Jam Pelatihan/Pekerja
Preparing Non-Life Treaty Renewal: Designing Treaty Program That Suits Your Strategy & Portfolio	1	6	6
Program Sertifikasi Kompetensi PERHUMAS	1	8	8
Reinventing Digital Transformation and Organizational Agility	4	16	4
Surety Bond dan Kontra Bank Garansi - Prinsip dan Praktik serta Prosedur dan Penanganan Klaim Surety Bond	1	6	6
Taps of Actuaries (5, 12, 19 Desember 2020)	10	50	5
The Perfect Secretary & PA	1	16	16
The Power of You	2	8	4
Training & Certification Human Resources Officer 2020	1	20	20
Training CDSP 2020	1	10	10
Training Online "Pemberdayaan Diri dalam Work From Home"	1	4	4
Training Online Public Digital Training Interpretasi KPKU BUMN 2020	3	27	9
Training Pengelolaan Kearsipan dan Kesekretariatan Berbasis ISO 15489-1-2-16 & SNI 8642	2	24	12

Topik Pelatihan	Jumlah Peserta	Jam Pelatihan	Rerata Jam Pelatihan/Pekerja
Training Sertifikasi Nasional CRGP	1	20	20
Ujian Sertifikasi ERMA	1	6	6
Understanding Oil & Gas Law	5	15	3

Indeks Isi GRI [GRI 102-55]

Standar GRI	No. Indeks	Keterbukaan (Disclosure)	Halaman
Pengungkapan Umum			
GRI 102: Pengungkapan Umum	Profil Organisasi Organization Profile		
	102-1	Nama organisasi	20
	102-2	Kegiatan, Merek, produk, dan jasa	21
	102-3	Lokasi Kantor Pusat	21
	102-4	Lokasi operasi	22
	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	21
	102-6	Pasar yang dilayani	22
	102-7	Skala organisasi	31
	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	32
	102-9	Rantai pasokan	44
	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	44
	102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan	91
	102-12	Inisiatif eksternal	22
	102-13	Keanggotaan asosiasi	22
Strategi			
102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	3 - 7	
Etika dan Integritas			
102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	25	
Tata Kelola			
102-18	Struktur tata kelola	87- 89	
Keterlibatan Pemangku Kepentingan			

102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	104
102-41	Perjanjian perundingan kolektif	124
102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	136
102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan	136
102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan	136
Praktik Pelaporan Reporting Practices		
102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	130
102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topik	132
102-47	Daftar topik material	136
102-48	Penyajian kembali informasi	130
102-49	Perubahan dalam pelaporan	130
102-50	Periode pelaporan	130
102-51	Tanggal laporan terbaru	130
102-52	Siklus pelaporan	130
102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	103
102-54	Klaim bahwa laporan sesuai dengan standar GRI	147
102-55	Indeks isi GRI	147
102-56	Pemeriksaan oleh pihak eksternal	147

Pengungkapan Topik Spesifik

Aspek Ekonomi

GRI 103:

Pendekatan Manajemen

Kinerja Ekonomi

103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	136
-------	--	-----

GRI 201:

Kinerja Ekonomi

201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	
-------	--	--

Dampak Ekonomi Tidak Langsung

GRI 103:

Pendekatan Manajemen

103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	136
-------	--	-----

GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	56
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	56
Anti-Korupsi			
GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	136
GRI 205: Anti-korupsi	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang anti-korupsi	72
Aspek Sosial			
GRI 103: Pendekatan Manajemen	Kepegawaian Employment		
	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	136
GRI 401: Kepegawaian	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	65
	Pendidikan dan Pelatihan Education and Training		
GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	136
GRI 404: Pendidikan dan Pelatihan	404-1	Rata-rata jam pelatihan per karyawan per tahun	68
	Keberagaman dan Kesetaraan Peluang		
GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	136
	405-1	Keanekaragaman karyawan	95

Referensi POJK 51

Laporan Keberlanjutan memuat informasi mengenai:		Halaman
1.	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	08-10
2.	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	
	a. Aspek ekonomi	
1	Kuantitas produksi atau jasa yang dijual;	5
2	Pendapatan atau penjualan;	5
3	Laba atau rugi bersih;	5
4	Produk ramah lingkungan; dan	5
5	Pelibatan pihak local yang berkaitan dengan proses bisnis Keberlanjutan	6 - 7
	b. Aspek lingkungan Hidup	
1	Penggunaan energi (antara lain listrik dan air);	6
2	Pengurangan emisi yang dihasilkan;	6
3	Pengurangan limbah dan efluen;	6
	c. Uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan keberlanjutan bagi masyarakat dan lingkungan	44, 48, 71
3.	Profil Singkat	
	a. Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Perusahaan;	25
	b. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan;	18
	c. Skala usaha, meliputi:	
1	Total asset atau kapitalisasi asset, dan total kewajiban;	23
2	Informasi mengenai karyawan;	23
3	Persentase kepemilikan saham (public dan pemerintah);	19
4	Wilayah operasional.	18
	d. Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;	18

	e. Keanggotaan pada asosiasi;	22
	f. Perubahan signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.	99
4.	Penjelasan Direksi memuat:	
	a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:	
	1 Penjelasan nilai keberlanjutan bagi Perusahaan;	10
	2 Penjelasan respons Perusahaan terhadap isu terkait penerapan keberlanjutan;	10
	3 Penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan keberlanjutan;	9
	4 Pencapaian kinerja penerapan keberlanjutan; dan	11 - 14
	5 Tantangan pencapaian kinerja penerapan berkelanjutan.	15
	b. Penerapan berkelanjutan	
	1 Pencapaian kinerja penerapan keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target; dan	11 - 14
	2 Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Berkelanjutan).	15
	c. Strategi pencapaian target	
	1 Pengelolaan risiko atas penerapan keberlanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup;	91
	2 Pemanfaatan peluang dan prospek usaha;	16
	3 Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.	10
5.	Tata Kelola Keberlanjutan	
	a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keberlanjutan;	87
	b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keberlanjutan;	90
	c. Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan keberlanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik;	91
	d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan:	
	1 Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; dan	103 - 105
	2 Pendekatan yang digunakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan keberlanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.	103 - 105

e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan keberlanjutan.		45
6. Kinerja Keberlanjutan		
a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK. Emiten, dan Perusahaan Publik.		32
b. Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi:		
1	Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan	32
2	Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrument keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keberlanjutan.	35 - 36
c. Kinerja sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir:		
1	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan atau jasa yang setara kepada konsumen;	39
2	Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat:	
a	Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak;	64
b	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional;	64
c	Lingkungan bekerja yang layak dan aman;	70
d	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.	67
3	Masyarakat, paling sedikit memuat:	
a	Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar;	72
b	Mekanisme dan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti;	95
c	TJSL pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat;	83
d	Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
7. Verifikasi Terlulis dari Pihak Independen, jika ada		



11

Lembar Umpan Balik





Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membaca Laporan Keberlanjutan Indonesia Re tahun 2020. Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keberlanjutan, meningkatkan transparansi kinerja keberlanjutan dan sebagai masukan untuk penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 Kami berharap Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan dan mengirimkannya kembali kepada kami.

01

Laporan Keberlanjutan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Indonesia Re

 Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju**02**

Data dan informasi yang diungkapkan dalam Laporan ini disajikan secara terstruktur, mudah dimengerti dan mudah dipahami?

 Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju**03**

Data dan informasi yang diungkapkan dalam Laporan ini disajikan secara lengkap, transparan dan berimbang?

 Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju**04**

Apakah design, jenis font, ukuran, tata warna, tata letak dan gambar dalam Laporan ini menarik dan mudah dibaca?

 Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju

05

Informasi apa saja dalam Laporan ini yang dirasakan paling bermanfaat?

06

Informasi apa saja dalam Laporan ini yang dirasakan kurang bermanfaat?

07

Informasi apa saja dalam Laporan ini yang dirasakan harus dilengkapi dalam Laporan Keberlanjutan mendatang?

Profil PembacaNama Lengkap

Nama Institusi/Perusahaan

Email

Identifikasi kelompok pemangku kepentingan (pilih salah satu):

- Pemerintah Industri Media Lain-lain, Mohon Sebutkan
- LSM Akademik Masyarakat

Kami menghargai saran dan tanggapan yang Bapak/Ibu/Saudara berikan kepada kami atas informasi yang disajikan dalam Laporan ini. Untuk menyampaikannya, mohon lembar umpan balik ini dikirimkan kembali kepada: [\[GRI 102-53\]](#)

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) [GRI 102-3]

Jl. Salemba Raya No.30, RT.5/RW.6, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

 62-21 3920101
 62-21 3143828
 cosecretary@indonesiare.co.id